

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transmigrasi merupakan program perpindahan penduduk yang dilakukan oleh pemerintah dari daerah yang padat penduduk seperti di Pulau Jawa, Bali, dan Madura ke wilayah-wilayah yang kurang padat penduduknya seperti di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Program ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan distribusi penduduk, membuka lahan pertanian baru, meningkatkan kesejahteraan penduduk di daerah asal yang padat, serta mendorong pembangunan dan pemerataan ekonomi di wilayah-wilayah yang masih kurang berkembang.¹

Salah satu tujuan transmigrasi di Sulawesi adalah wilayah Wonomulyo yang sebelumnya merupakan hutan belantara sama sekali tidak di sentuh oleh masyarakat lokal untuk dimanfaatkan sebagai hasil bumi melimpah. Namun, memasuki tahun 1937 wilayah tersebut akhirnya digarap oleh pemerintah Belanda atas program yang mereka jalankan yakni kolonisasi.² Dari program kolonisasi itulah sehingga Wonomulyo menjadi wilayah banyak didatangi oleh orang-orang Jawa dan berkembang sebagai penyuplai hasil bumi berupa pertanian.

Wonomulyo yang awalnya merupakan sebuah distrik bagi para kolonisasi Jawa di dirikan sejak tahun 1937 pada masa pemerintahan kolonial Belanda tepatnya di Sulawesi Selatan.³

¹ Ernan Rustiadi, Junaidi. "Transmigrasi Pengembangan Wilayah (Teori dan Konsep)," *Jurnal Bumi Lestari* 14, no. 2 (2014): 41–133: 1-2.

² Kolonisasi adalah perpindahan penduduk dari wilayah asal ke wilayah koloni yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dalam rangka untuk menambah penghasilan pemerintah Belanda tersebut.

³ Gunt Sumedi. *Wonomulyo: Potret Kampong Djawa Di Sulawesi Barat*. Makassar: De la maacca (2014): 3.

Kemudian pada tahun 1950 setelah Indonesia merdeka di mekarkan menjadi Kecamatan Wonomulyo bekas daerah kantong kolonisasi dari gabungan distrik Mapilli, Wonomulyo, dan Tapango. Salah seorang camat pertama di Kecamatan Wonomulyo adalah Raden Soeparman yang pada saat itu bertugas sebagai pemimpin kedatangan kolonisasi.⁴ Nama Desa yang ada di Kecamatan Wonomulyo menggunakan bahasa Jawa antara lain, Desa Bumi Ayu, Desa Sumberjo, Desa Campurjo, Desa Sidorejo, Desa Arjosari, Kelurahan Sidodadi, Desa Sugihwaras, Desa Kebunsari, Desa Bumi Mulyo, sedangkan Desa yang lain menggunakan bahasa Mandar seperti Banua Baru, Bakka-bakka, Nepo, Galeso, dan Tumpiling. Dengan adanya peraturan pemerintah Indonesia tentang Jawatan Transmigrasi berdasarkan keputusan Menteri Sosial Nomor Kab.10-6-20 tanggal 2 Februari 1951. Program transmigrasi mulai dilaksanakan.

Arti dari sebutan Wonomulyo itu sendiri juga berasal dari bahasa Jawa yaitu *Wono* adalah hutan dan *Mulyo* yakni mulia apabila digabungkan maka wilayah tersebut berarti Hutan Mulia.⁵ Tetapi masyarakat baik Mandar maupun Bugis menyebutnya *Kampung Jawa* atau Kampungnya Orang Jawa apabila mereka hendak berkunjung untuk membeli sesuatu dan bersilaturahmi. Selain itu, Kecamatan Wonomulyo dianggap sebagai satu-satunya wilayah yang sangat unik di Sulawesi Barat dengan menggunakan nama Desa maupun jalan berbahasa Jawa.

Awal kedatangan transmigran Jawa di Kecamatan Wonomulyo pada tahun 1937 gelombang pertama tidak terlalu banyak, transmigran Jawa ke Sulawesi di angkut dengan menggunakan kapal laut. Setelah mereka berada di Kecamatan Wonomulyo transmigran tersebut berupaya membuka lahan yang nantinya akan menjadi lumbung pangan bagi

⁴ Gunt Sumedi. *Wonomulyo: Potret Kampoeng...*(2014): 8.

⁵ Gunt Sumedi. *Wonomulyo: Potret Kampoeng...*(2014): 22.

pemerintah Belanda. Hanya saja luas pekarangan tanah yang di berikan kepada transmigran 1/3 masing-masing orang.

Memasuki tahun 1960an di Pulau Sulawesi sedang mengalami kekacauan dengan adanya gerakan pemberontak DI/TII yang pada saat itu di pimpin oleh Kahar Muzakkar dan pasukannya beserta Andi Selle selaku pemimpin Batalyon 710.⁶ Aksi yang dilakukan oleh Kahar Muzakkar bersama pasukannya di mulai sejak tahun 1950, tetapi di wilayah Kecamatan Wonomulyo belum terlalu berdampak. Barulah sekitar tahun 1960 hingga 1965 Kecamatan Wonomulyo merasakan aksi pemberontakan tersebut. Sementara itu, masyarakat transmigran tetap memilih berada di Kecamatan Wonomulyo meskipun terjadi peristiwa besar sehingga sebagian dari mereka ikut terlibat kedalam pasukan gerilyawan.

Kehadiran tentara Batalyon 710 di wilayah Polewali yang awalnya dikenal sebagai Batalyon 719 dengan pangkalan pertamanya berada di Maros.⁷ Tetapi memasuki sekitar akhir tahun 1951, kemudian Batalyon tersebut di ubah menjadi Batalyon 710 dan secara strategis pangkalannya di pindahkan ke wilayah Mandar dengan mencakup daerah Mamuju, Polewali, dan Majene.⁸ Keputusan penempatan batalyon ini di kawasan Mandar bukan tanpa alasan. Mandar, sebagai salah satu kawasan penting di Sulawesi bagian Barat, menjadi daerah yang rawan pengaruh pemberontakan, khususnya gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).

Dipimpin oleh Letnan Kolonel Andi Selle Mattola, Batalyon 710 tidak hanya berfungsi sebagai satuan tempur murni, tetapi juga menjadi entitas yang memiliki pengaruh luas dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu ciri khas dari batalyon ini adalah

⁶ Batalyon 710 adalah pangkalan militer di bawah kepemimpinan Andi Selle.

⁷ Bahtiar, dkk. *Dinamika Kemiliteran: Dari Kelaskaran Hingga Batalyon 710 Di Sulawesi Selatan*. (Makassar: Unhas Press, 2019): 53.

⁸ Andi Sainal. Andi Selle Dalam Pergolakan Bersenjata di Sulawesi Selatan (1950-1964). *Jurnal: Historical Studies* 1 (1), Makassar (2017): 28.

kemampuannya untuk merekrut dan memobilisasi ribuan warga sipil sebagai Tenaga Bantuan Operasional (TBO). Para TBO ini dilatih secara singkat dan diintegrasikan ke dalam operasi militer, meskipun mereka bukan tentara reguler. Mereka memiliki peran penting dalam memperkuat kekuatan batalyon, baik dari sisi logistik, pengintaian, hingga pertempuran langsung di lapangan.

Keunikan lainnya dari Batalyon 710 adalah kemampuannya untuk mengelola pembiayaan operasional secara mandiri. Mereka mendirikan dan mengelola usaha ekonomi seperti PT. Pembangunan di Majene, yang menjadi sumber pendanaan operasional dan gaji bagi personel TBO. Karena itu, batalyon ini sempat mendapat julukan sebagai “batalyon dollar” sebuah penanda bahwa mereka tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara.⁹

Batalyon 710 dipandang sebagai pahlawan yang melindungi rakyat dari ancaman pemberontakan DI/TII, yang saat itu sering memaksa penduduk untuk meninggalkan keyakinan mereka dan bergabung dengan barisan gerilyawan. Di sisi lain, terdapat kecenderungan dalam pola kepemimpinan yang berfokus pada masing-masing orang atau tokoh tertentu secara personal rekrutmen massa sipil tanpa regulasi ketat, dan kecenderungan bertindak di luar kendali struktur militer pusat menjadikan batalyon ini seperti "negara dalam negara".

Setelah di bentuknya PT. Pembangunan, sebuah perusahaan militer yang bertugas membeli hasil pertanian dan perkebunan masyarakat, termasuk kopra, beras, dan kelapa, yang menjadi komoditas utama di Wonomulyo dan sekitarnya.¹⁰ Namun, pelaksanaan kebijakan ekonomi tersebut cenderung didominasi oleh sebagian pihak dan berlangsung dengan tekanan yang kuat terhadap pihak lain bahkan memaksa. Warga, termasuk transmigran, tidak diberi

⁹ Andi Sainal. *Andi Selle Dalam...* (2017): 29.

¹⁰ Bahtiar, dkk. *Dinamika Kemiliteran: Dari...*(2019): 58.

pilihan untuk menjual hasil taninya ke pihak lain. Mereka wajib menjual ke PT. Pembangunan dengan harga yang ditentukan sepihak oleh militer.

Bila ada warga yang mencoba menjual ke pembeli lain atau mempertanyakan harga, mereka sering kali menerima intimidasi, bahkan kekerasan. Beberapa kesaksian menyebut bahwa ada warga yang dipukuli, ditahan, hingga ditembak hanya karena menolak menjual hasil taninya ke perusahaan militer tersebut. Para transmigran, yang tidak memiliki jejaring sosial lokal dan belum paham situasi politik daerah, menjadi korban paling rentan. Mereka datang ke tanah baru dengan idealisme dan kerja keras, namun akhirnya berhadapan dengan sistem kekuasaan yang tak bisa dipengaruhi dan bersenjata.

Kekuasaan besar Batalyon 710 juga diperkuat oleh keberadaan ribuan warga sipil yang direkrut sebagai TBO (Tenaga Bantuan Operasional).¹¹ TBO ini dilatih secara militer, dipersenjatai, dan diberi legitimasi untuk ikut serta dalam operasi militer. Akan tetapi, dalam praktiknya, banyak TBO ini digunakan untuk menjaga kepentingan ekonomi batalyon, termasuk dalam mengawasi transmigran dan aktivitas jual beli hasil bumi. Militerisme ini merasuk ke dalam kehidupan masyarakat secara total. Tidak ada ruang aman bagi warga untuk mengadu, sebab lembaga hukum dan pemerintahan sipil tidak berdaya menghadapi dominasi militer di wilayah tersebut.

Peristiwa yang terjadi di wilayah Polewali hingga memasuki perkampungan khususnya di Wonomulyo sebenarnya mencerminkan pergeseran fungsi militer dari alat pertahanan negara menjadi alat kekuasaan dan penindasan. Situasi ini diperburuk oleh status Sulawesi yang kala itu masih dalam keadaan darurat militer karena pengaruh pemberontakan DI/TII. Keadaan darurat ini digunakan sebagai pembenaran bagi aparat militer untuk bertindak keras dan tanpa aturan hukum yang jelas. Bagi Batalyon 710, siapa pun yang dianggap "mengganggu stabilitas"

¹¹ Bahtiar, dkk. *Dinamika Kemiliteran: Dari...*(2019): 65.

termasuk petani transmigran yang menolak sistem ekonomi mereka bisa dianggap sebagai ancaman yang layak dilumpuhkan.

Kekejaman yang dirasakan para transmigran di Wonomulyo tidak hanya fisik, tapi juga psikologis dan ekonomi. Mereka hidup dalam ketakutan, harus menyerahkan hasil kerja kerasnya dengan harga yang tidak adil, dan tidak memiliki daya tawar di tanah yang seharusnya menjadi tempat mereka membangun masa depan. Bahkan, anak-anak dan keluarga mereka tumbuh dalam suasana tidak aman, di mana tentara dan senjata adalah bagian dari kehidupan sehari-hari.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini sudah di bawah kendali Presiden Soeharto melihat situasi ini akhirnya mengirim pasukan Siliwangi yang dipimpin oleh Solihin ke Sulawesi Selatan untuk meredam aksi pemberontakan yang dilakukan oleh Kahar Muzakkar beserta pasukannya. Apabila kita cermati, peristiwa DI/TII di Sulawesi Selatan sama halnya dengan pemberontakan PKI yang mulai meletus tahun 1965 di Madiun yang di pimpin oleh D. N. Aidit menyuarakan agar Indonesia berbentuk Negara Komunis. Sedangkan DI/TII terjadi karena Kahar Muzakkar merasa tidak puas terhadap kebijakan pemerintah pusat dan bentuk Negara harus berideologi Islam. Keadaan di Sulawesi akhirnya mulai membaik pada akhir tahun 1965, setelah pemimpin DI/TII meninggal yakni Kahar Muzakkar terbunuh dalam pertempuran di tepi sungai Lasolo.

Memasuki tahun 1966 di bawah kekuasaan Presiden Soeharto masa orde baru di mulai berdasarkan surat perintah 11 Maret 1966.¹² Masyarakat transmigran di Kecamatan Wonomulyo akhirnya merasa lega setelah terjadinya peristiwa besar yang mereka sangat takutkan, pada saat Presiden Soeharto memimpin kebutuhan mereka cukup terpenuhi dalam sektor pertanian seperti adanya program pembagian pupuk bagi setiap petani.

¹² Ricklefs M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Yogyakarta: Serambi (2008): 462-471.

Komoditas pertanian seperti padi, kedelai, jagung, dan sayuran menjadi tanaman utama yang diusahakan. Pada tahun 1970 teknologi pertanian masih sangat sederhana, dengan irigasi yang terbatas dan ketergantungan pada hujan untuk pengairan. Namun, dengan semangat kerja keras transmigran, Wonomulyo mulai menghasilkan hasil pertanian yang cukup signifikan. Perubahan ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, tetapi juga menciptakan komunitas baru yang multikultural, masyarakat dari berbagai latar belakang etnis dapat hidup berdampingan.

Kecamatan Wonomulyo sebagai wilayah transmigran menjadi salah satu yang paling berkembang di Sulawesi. Bahkan, Wonomulyo tidak hanya menjadi contoh bagi wilayah-wilayah di sekitarnya, tetapi juga telah berkembang menjadi salah satu pasar terbesar dan pusat perdagangan bahan makanan di wilayah Mandar.¹³ Interaksi antara para transmigran dan penduduk lokal juga berjalan dengan baik, tanpa menghadapi banyak hambatan sehingga tercipta keharmonisan antar etnis yang kuat.¹⁴ Beberapa perkembangan signifikan pada aspek ekonomi adalah adanya pasar induk Wonomulyo pada tahun 1943-1960 bernama Pasar Nganjuk. Aktivitas hiburan juga mulai berlangsung pada periode tersebut ditandai dengan adanya Bioskop Gelora. Serta terdapat penambahan lahan permukiman pada bagian Barat dari kawasan peribadatan dan kesehatan. Tak hanya itu, peralihan fungsi lahan juga terjadi pada kawasan pertanian di bagian Barat hingga Barat Laut dari kawasan alun-alun, penambahan beberapa fungsi perdagangan pada kawasan sekitar pasar, fungsi pendidikan, dan fungsi peribadatan mulai terbentuk.

Memasuki tahun 1970, di Kecamatan Wonomulyo telah dikenal sebagai julukan pasar yang tidak pernah tidur di karenakan sejak adanya pasar subuh beroperasi mulai pukul 12.00

¹³ Adi Arwan Alimin. “*Kampung Jawa di Tanah Mandar: Kronik Sejarah Kedatangan Kolonis Mapilli*”. Polewali: Gerbang Visual (2019): 35.

¹⁴ Adi Arwan Alimin. *Kampung Jawa di...*(2019): 37.

malam hingga pukul 08.00 pagi. Hasil pertanian dijual di pasar tersebut, kemudian pembeli tidak hanya masyarakat Wonomulyo saja tetapi banyak juga datang dari wilayah lain seperti Majene dan Mamasa. Hal inilah menjadikan daerah transmigrasi di Kecamatan Wonomulyo semakin meningkat.

Keberadaan transmigran di Kecamatan Wonomulyo juga melestarikan adat istiadat mereka dan menampilkan kesenian Jawa yang dipertunjukkan pada saat acara-acara tertentu, seperti Wayang orang, dan gamelan. Akulturasi antara adat Mandar dengan adat Jawa memiliki keunikan masing-masing utamanya dalam pemajuan kebudayaan khususnya di Kecamatan Wonomulyo. Salah satu contohnya pada saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW anak-anak yang telah menamatkan bacaan Al-quran akan diarak keliling kampung dengan menunggang kuda atau dalam bahasa Mandar disebut *Totammaq Messawe* sebagai penghormatan bagi mereka selama mengaji dan diiringi rebana serta melontarkan pantun berbahasa Mandar yakni *kalindaqdaq*.¹⁵

Sejak adanya transmigran Jawa di Kecamatan Wonomulyo pada tahun 1950 tidak pernah sama sekali mengalami konflik dengan suku Mandar apalagi dalam mengurus lahan pertanian maupun sebagai lokasi hunian masyarakat. Hubungan kekeluargaan antara dua suku tersebut saling menguntungkan satu sama lain, sudah banyak terjadi perkawinan silang yang kemudian menyatukan adat istiadat sehingga perilaku kehidupan di Kecamatan Wonomulyo aman dan tentram. Bahkan hingga saat ini kelangsungan hidup di Kecamatan Wonomulyo memberikan dampak positif bagi wilayah lainnya terutama perekonomian.

Masyarakat transmigran terus beradaptasi dengan lingkungan fisik yang berbeda, termasuk iklim, jenis tanah, dan kondisi geografis.¹⁶ Selain itu, mereka juga harus

¹⁵ Gunt Sumedi. *Wonomulyo: Potret Kampoeng...*(2014): 47.

¹⁶ Fifi Fausiah. *Kondisi Ketersediaan Sarana Prasarana Permukiman Transmigrasi Di Kabupaten Morotai-Maluku Utara*. Tesis (2012): 13.

menyesuaikan diri dengan masyarakat lokal yang memiliki tradisi, adat, dan nilai-nilai sosial yang berbeda. Meskipun ada beberapa gesekan pada awalnya, interaksi antara transmigran dan masyarakat lokal Mandar secara bertahap menghasilkan bentuk integrasi sosial yang relatif harmonis. Masyarakat transmigran membawa serta keterampilan bertani yang lebih maju dan memperkenalkan metode pertanian intensif yang kemudian turut meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah tersebut.

Pada akhirnya, program transmigrasi di Wonomulyo membawa transformasi besar bagi wilayah ini. Wonomulyo berubah dari daerah yang sepi dan kurang berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian. Setelah Indonesia merdeka, Wonomulyo menjadi salah satu fokus transmigrasi pemerintah yang baru. Pada masa ini, penduduk transmigran di Wonomulyo mulai lebih terorganisir, dan pemerintah memberikan bantuan berupa lahan, bibit, serta alat-alat pertanian. Lahan yang dulunya berupa hutan dan rawa-rawa diubah menjadi sawah dan ladang oleh para transmigran yang datang, terutama dari Jawa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik sebuah rumusan masalah:

1. Mengapa mereka masih bertahan di Kecamatan Wonomulyo meskipun telah terjadi aksi pemberontakan yang dilakukan oleh oknum 710 ?
2. Bagaimana strategi bertahan yang dilakukan oleh masyarakat transmigran di Kecamatan Wonomulyo ?

1.3 Batasan Masalah

Dalam menentukan batasan masalah saat penelitian sejarah, sejarawan harus melakukan pembatasan ruang lingkup penelitiannya, agar dapat fokus pada objek yang dikaji. Batasan masalah dalam historiografi terbagi menjadi dua bagian, yaitu batas waktu (temporal) dan batasan tempat (spasial). Batasan-batasan ini dibuat sedemikian rupa untuk menunjang

penelitian dipusatkan pada bidang tertentu dan dalam waktu tertentu tanpa harus meninggalkan pokok bahasan. Pembatasan juga dilakukan agar penelitian lebih terfokus pada penulisan.

1. Batasan Temporal

Penulisan proposal ini mempunyai batasan temporal yakni pada tahun 1950-1970. Pada periode tersebut di pilih karena tahun 1950 merupakan awal pelaksanaan program transmigrasi di Indonesia. Sedangkan tahun 1970 di pilih karena untuk melihat situasi di Kecamatan Wonomulyo setelah terjadinya aksi pemberotakan oleh tentara Batalyon 710.

2. Batasan Spasial

Pada batasan spasial ini penulis memfokuskan penulisannya di Kecamatan Wonomulyo karena di wilayah tersebut merupakan awal mulainya keberadaan masyarakat transmigran Jawa bermukim yang kemudian dari tahun ke tahun berkembang menjadi kampung transmigrasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengapa mereka masih bertahan di Kecamatan Wonomulyo meskipun telah terjadi aksi pemberontakan yang dilakukan oleh tentara Batalyon 710 di bawah pimpinan Andi Selle.
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi bertahan yang dilakukan oleh masyarakat transmigran di Kecamatan Wonomulyo.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk lulus dari mata kuliah seminar praskripsi di Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Sebagai literatur untuk menambah referensi bagi yang ingin mengetahui tentang keberadaan transmigrasi orang Jawa di Kecamatan Wonomulyo.

3. Mengetahui masalah yang dihadapi masyarakat transmigran Jawa di Kecamatan Wonomulyo pada saat adanya aksi pemberontakan yang dilakukan oleh tentara Batalyon 710.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Penelitian Yang Relevan

Relevansi sumber literatur pertama yaitu buku karya Gunt Sumedi yang berjudul “Wonomulyo Potret Kampoeng Jawa di Sulawesi Barat” (2014). Buku ini berfokus pada sejarah transmigrasi di Wonomulyo sebagai peristiwa sentral yang terjadi pada masa kolonial Hindia-Belanda sejak tahun 1930. Wonomulyo awalnya merupakan pemukiman yang didirikan oleh orang Jawa yang bermigrasi ke Sulawesi Selatan selama masa kolonial. Transmigrasi ke Wonomulyo adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meratakan populasi dan membuka lahan-lahan baru. Gunt Sumedi sebagai penulis memaparkan lebih dalam mengenai potret sebelum dan sesudah proses transmigrasi dilakukan, mulai dari pembukaan lahan, infrastruktur, hingga sistem pertanian melalui arsip Disbudpar Polman. Beberapa tokoh penting yang terdapat dalam buku ini adalah Raden Soeparman yang merupakan ketua rombongan transmigrasi gelombang pertama pada tahun 1937, dan mengikutsertakan beberapa tenaga terampil seperti tenaga pengajar, tenaga medis (dikepalai oleh R. Subaker), tenaga bidang pertanian (dikepalai oleh R. Sukiran), dan bidang pertahanan (dikepalai oleh Tahalele). Para transmigran tersebut membawa serta tradisi, adat istiadat, dan agama yang mereka anut, yang kemudian berasimilasi dengan budaya lokal Sulawesi.¹⁷

Tulisan "*Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*" karya Anak Agung Gde Agung merupakan salah satu sumber sejarah penting yang merekam dinamika politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan, khususnya ketika Indonesia berada dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Buku ini tidak hanya merekam peristiwa politik

¹⁷ Gunt Sumedi. *Wonomulyo: Potret Kampoeng Djawa Di Sulawesi Barat*. (Makassar: De la maacca. 2014).

secara kronologis, tetapi juga mencerminkan ketegangan ideologis antara pusat dan daerah dalam membentuk negara nasional pascakolonial.¹⁸ Relevansi karya ini dalam kajian transmigrasi orang Jawa ke Kecamatan Wonomulyo pada periode 1950–1970 terletak pada konteks historis dan politik yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan transmigrasi itu sendiri, khususnya di wilayah bekas Negara Indonesia Timur (NIT), tempat Sulawesi Barat berada. ransmigrasi orang Jawa ke Kecamatan Wonomulyo di Sulawesi Barat, yang mulai berlangsung intensif pada awal 1950-an, merupakan bagian dari kebijakan nasional yang didorong oleh semangat pemerataan pembangunan sekaligus penguatan identitas nasional. Buku Anak Agung membantu menyingkap latar belakang penting mengenai kondisi wilayah Indonesia Timur pasca-RIS yang penuh dengan ketegangan etnis, sentimen kedaerahan, dan ketimpangan sosial. Dalam konteks inilah, program transmigrasi ke daerah seperti Wonomulyo menjadi strategis, karena mendukung proses nasionalisasi wilayah yakni memastikan bahwa kawasan bekas NIT tidak hanya tunduk secara administratif kepada pusat, tetapi juga mengalami proses transformasi sosial dan budaya yang mencerminkan nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan. Kehadiran orang Jawa, sebagai kelompok pendatang yang identik dengan pemerintah pusat, tidak hanya membawa perubahan struktur ekonomi dan pertanian di Wonomulyo, tetapi juga berperan dalam menanamkan semangat nasionalisme di daerah yang memiliki pengalaman sejarah yang berbeda dari wilayah asalnya.

Relevansi sumber literatur selanjutnya yaitu buku karya Ricklefs M.C. berjudul “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004” (1991) yang mengkaji perjalanan sejarah Indonesia dari periode awal hingga awal abad ke-21 dengan fokus pada perubahan politik, sosial, dan budaya yang membentuk negara ini. Diawali dengan perkembangan kerajaan-kerajaan lokal seperti Majapahit dan Sriwijaya, buku ini menyoroti bagaimana pengaruh asing, terutama dari

¹⁸ Ide Anak Agung Gde Agung. *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 1985.

Eropa dan Arab, mulai masuk melalui perdagangan. Selanjutnya, periode kolonisasi Belanda dari abad ke-18 hingga awal abad ke-20 membawa dampak signifikan terhadap struktur sosial dan ekonomi, meski banyak penduduk lokal yang terpinggirkan. Dalam fase pergerakan nasional yang muncul pada awal abad ke-20, kebangkitan nasionalisme terlihat jelas melalui pembentukan berbagai organisasi politik yang berjuang melawan penjajahan. Persamaan penelitian penulis dengan buku karya Merle yaitu pada nilai sejarah kolonisasi yang terjadi di Indonesia sejak abad ke-18 dan memiliki tantangan di Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Namun yang menjadi pembeda, penulis berfokus kepada bentuk program yang dilanjutkan oleh Indonesia pasca kemerdekaan seperti transmigrasi Jawa ke Wonomulyo, sedangkan pada buku Merle memaparkan transisi pasca kemerdekaan ke orde baru yang membawa kebijakan pembangunan yang berorientasi pada stabilitas, meskipun diiringi oleh pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi.¹⁹

Relevansi sumber literatur berikutnya yaitu jurnal oleh Muhammad yang berjudul “Wonomulyo: dari Kolonisasi ke Transmigrasi 1937-1952 (2020). Jurnal tersebut menjelaskan bagaimana kebijakan transmigrasi di Indonesia telah berubah sejak tahun 1950. Jika kolonisasi berfokus pada penyediaan tenaga kerja murah bagi perusahaan kolonial, transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Perkembangan transmigrasi di Wonomulyo sangat pesat, dan daerah ini kemudian menjadi contoh sukses bagi program transmigrasi lainnya di Indonesia. Data-data yang terdapat dalam penelitian ini berkaitan erat dengan berbagai transisi regulasi diantaranya adalah regulasi kolonialisme pemerintahan Hindia-Belanda tentang kebijakan tentang emigrasi pada awal abad ke-20. Kebijakan tersebut tidak terlepas dari perubahan kebijakan politik pemerintah Belanda berdasarkan pidato tahta Ratu Wilhelmina pada 1901. Sedangkan pasca kemerdekaan,

¹⁹ Ricklefs M. C. *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2008*. Jakarta: Serambi 2008.

regulasi telah. Pelaksanaan pemindahan penduduk yang sebelumnya disebut dengan kolonisasi berubah menjadi transmigrasi yang merupakan tugas Kementerian Pembangunan Masyarakat melalui Peraturan Menteri Pembangunan Masyarakat RI No.1 tahun 1950, didirikan Kantor Transmigrasi (jawatan dalam pertumbuhan) yang diberi tugas khusus untuk melaksanakan penyelenggaraan transmigrasi.²⁰

Relevansi sumber literatur selanjutnya yaitu Jurnal Ernani Rustiadi dan Junaidi berjudul "Transmigrasi dan Pengembangan Wilayah" (2011). Pada penelitian tersebut relevan dengan apa yang penulis teliti, hal tersebut dikarenakan adanya fakta menunjukkan bahwa program transmigrasi telah mencapai berbagai keberhasilan, baik dalam aspek demografis maupun non-demografis. Wonomulyo yang potensial untuk pengembangan daerah pertanian, terutama untuk persawahan karena memiliki tanah yang subur dan datar serta curah hujan yang cukup teratur, kemudian berkembang menjadi konsentrasi perdagangan di Kabupaten Polewali Mandar. Bagi pedagang-pedagang dari berbagai daerah yang ada di Polewali Mandar, Wonomulyo merupakan tujuan utama untuk menjual barang-barang dagangan mereka, disamping karena tempat mereka berjualan lebih nyaman juga karena pembeli datang dari berbagai tempat bahkan mereka yang berasal dari pedalaman datang berbelanja kebutuhan sehari-hari di Wonomulyo.²¹

Buku "*Negara dan Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an*" karya Dias Pradadimara, M. Bahar Akkase Teng, dan Hery Kusuma Tarupay merupakan salah satu kajian sejarah lokal yang sangat penting dalam memahami konteks sosial-politik Sulawesi Selatan pasca-kemerdekaan, terutama pada masa-masa krusial pembentukan Negara Kesatuan

²⁰ Muhammad Amir. "Wonomulyo: Dari Kolonisasi Ke Transmigrasi 1937-1952". *Jurnal Pengadereng*. Vol. 6. No. 1. Hal. 13-60. 2020.

²¹ Junaidi, Ernani Rustiadi. "Transmigrasi Pengembangan Wilayah (Teori dan Konsep)". *Jurnal Bumi Lestari* 14, Vol 1. No 2. Hal. 5-23. 2014.

Republik Indonesia (NKRI) dan mengenai kekuasaan negara di daerah. Dalam kaitannya dengan penelitian mengenai transmigrasi orang Jawa ke Kecamatan Wonomulyo, yang pada masa itu merupakan bagian dari wilayah administratif Sulawesi Selatan buku ini menjadi sumber yang sangat relevan karena membahas bagaimana negara dan masyarakat lokal berinteraksi, berkonflik, dan saling menyesuaikan diri selama masa transisi tersebut. Buku ini secara tidak langsung memberi pemahaman mendalam tentang alasan mengapa transmigrasi menjadi penting dalam wilayah seperti Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Ketika negara menghadapi tantangan untuk mengintegrasikan daerah-daerah yang memiliki tradisi politik lokal yang kuat, transmigrasi bukan hanya menjadi solusi atas persoalan kepadatan penduduk di Jawa, tetapi juga menjadi alat negara untuk menciptakan tatanan sosial baru di daerah-daerah yang dinilai perlu dikelola dan diawasi secara lebih ketat. Kehadiran komunitas Jawa di Wonomulyo, yang mulai berkembang sejak 1950-an, merupakan bagian dari upaya tersebut— yakni menghadirkan penduduk pendatang dengan latar belakang budaya dan politik yang sejalan dengan ide-ide nasionalisme dan modernisasi negara.²²

Relevansi sumber berikutnya yang ditulis oleh Adi Arwan Alimin dengan judul “Kampung Jawa di Tanah Mandar: Kronik Kedatangan Kolonis Mapilli”. Pertama kali bukunya di seminarkan pada acara peringatan hari jadi Kecamatan Wonomulyo yang ke-73 di Kantor Kecamatan Wonomulyo. Buku karangannya tersebut mendapat perhatian penting bagi pemerintah khususnya Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar pada umumnya. Buku terbitan tahun 2019 dari Gerbang Visual itu menjadi referensi bagi penulis salah satu pembahasannya pada halaman 30-44 menjelaskan tentang kegiatan yang dilakukan oleh para transmigran Jawa di Kecamatan Wonomulyo sejak mereka datang sekitar tahun 1937 mulai

²² Dias Pradadimara. “Kronika Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an” Edt. Dias Pradadimara, M. Bahar Akkase Teng, Heri Kusuma Tarupay. *Negara dan Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an*. (Yogyakarta: PT Kanisius) 2014.

dari pembukaan lahan hingga terbukanya lahan pertanian di distrik Mapilli. Adapun persamaan dari penelitian penulis yaitu untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh transmigran di Wonomulyo sedangkan perbedaannya terletak pada periodisasi buku karangan dari Adi Arwan Alimin tersebut tidak mencantumkan pembatasan penulisannya.²³

Relevansi sumber literatur selanjutnya yaitu di tulis oleh Bahtiar, Muhammad Amir, Syahrir Kila, dan Rosdiana Hafid yang berjudul “Dinamika Kemiliteran: Dari Kelaskaran Hingga Batalyon 710 di Sulawesi Selatan”. Buku tersebut di terbitkan oleh UPT Unhas Press di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai dan Budaya Sulawesi Selatan tahun 2019. Dalam pembahasan buku tersebut menyorotkan perhatian pembaca tentang gerakan militer di Sulawesi Selatan utamanya pada masa kemerdekaan yang mengakibatkan adanya pemberontakan di beberapa wilayah sejak tahun 1950. Salah satu yang menjadi rujukan penulis pada buku tersebut adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Selle bekerjasama dengan Kahar Muzakkar untuk mendirikan negara Indonesia sebagai negara berideologi Islam. Kahar Muzakkar bersama Andi Selle memasuki wilayah Wonomulyo merampok hasil bumi masyarakat transmigran seperti minyak, beras, dan sebagainya. Gerakan Batalyon 710 menjadikan masyarakat transmigran di Kecamatan Wonomulyo tunduk kepada mereka sehingga beberapa dari masyarakat ikut terlibat sebagai pasukan pemberontak dengan cara menyeret mereka secara paksa untuk ikut aksi. Buku ini bagi penulis sebagai pedoman mengetahui gerak-gerik Andi Selle Kahar Muzakkar dan pasukannya selama berada di Kecamatan Wonomulyo sejak tahun 1950 hingga berakhirnya aksi yang mereka lakukan pada akhir tahun 1965.

Tulisan Andi Sainal berjudul "*Andi Selle dalam Pergolakan Bersenjata di Sulawesi Selatan 1950–1964*" merupakan salah satu karya penting yang mengungkap secara historis

²³ Adi Arwan Alimin. *Kampung Jawa di Tanah Mandar: Kronik Sejarah Kedatangan Kolonis Mapilli*. Polewali Mandar: Gerbang Visual 2019.

keterlibatan tokoh-tokoh lokal dalam dinamika kekerasan dan pemberontakan bersenjata di wilayah Sulawesi Selatan pada masa pasca-kemerdekaan. Dalam tulisannya, Sainal tidak hanya menempatkan Andi Selle sebagai figur militer, tetapi juga mencerminkan betapa rumitnya hubungan antara berbagai kekuatan yang saling memengaruhi lokal dengan pusat kekuasaan negara di Jakarta, serta dengan dinamika internal militer sendiri, seperti keterlibatan berbagai batalyon termasuk Batalyon 710 dalam pergolakan tersebut.²⁴

Tulisan Andi Sainal memberikan pemahaman historis yang penting untuk memahami terjadinya konflik bersenjata di Sulawesi Selatan berdampak pada kehidupan masyarakat transmigran di Wonomulyo. Sumber ini memperkaya perspektif skripsi tidak hanya memberikan landasan berdasarkan fakta sejarah yang dapat diverifikasi, tetapi juga memberikan kedalaman analisis yang memperkaya pemahaman terhadap dinamika sosial dan politik yang berlangsung pada masa itu mengenai dinamika militer dan pemberontakan, tetapi juga dengan pemahaman tentang tokoh seperti Adni Selle memainkan peran dalam membentuk situasi politik dan keamanan yang dihadapi transmigran. Oleh karena itu, kajian ini sangat relevan dalam menjelaskan mengapa masyarakat transmigran tetap bertahan, dan bagaimana mereka mengembangkan strategi untuk bertahan hidup dan beradaptasi dalam kurun waktu 1950 hingga 1970, meskipun berada di tengah situasi yang penuh ketidakpastian, ancaman, dan ketegangan sosial yang tinggi.

Tulisan Barbara Harvey berjudul "*Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi ke DI/TII*" merupakan salah satu kajian penting yang mengupas secara mendalam tentang dinamika sosial-politik dan keagamaan di Sulawesi Selatan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Karya ini membahas gerakan Kahar Muzakkar dari sebuah perjuangan lokal berbasis ketidakpuasan terhadap pusat kekuasaan menjadi bagian dari gerakan Darul

²⁴ Andi Sainal. "Andi Selle dalam Pergolakan Bersenjata di Sulawesi Selatan (1950-1964)". *Yupa: Historical Studies Journal*. Vol. 1. No. (1). Hal. 16-45. 2020.

Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), yang memiliki ambisi mendirikan negara Islam. Tulisan Harvey ini sangat relevan ketika dihubungkan dengan topik skripsi mengenai transmigrasi orang Jawa ke Kecamatan Wonomulyo, khususnya dalam konteks ketegangan sosial dan politik yang terjadi pada kurun waktu 1950–1970, termasuk dengan adanya keterlibatan Batalyon 710 dalam pemberontakan di wilayah tersebut.²⁵ Barbara Harvey tidak hanya menelusuri aspek ideologis dan militer dari gerakan Kahar Muzakkar, tetapi juga memperlihatkan kondisi sosial-budaya lokal termasuk ketegangan antara penduduk asli Sulawesi Selatan dengan kelompok-kelompok luar ikut membentuk dinamika pemberontakan tersebut. Dalam konteks transmigrasi, tulisan ini menjadi sumber yang sangat berguna untuk memahami kehadiran pendatang dalam hal ini para transmigran Jawa dapat dianggap sebagai unsur yang asing dan bahkan berpotensi memicu ketegangan. Masyarakat lokal yang mendukung gerakan Kahar Muzakkar kerap memandang para transmigran sebagai bagian dari tugas negara yang mereka anggap tidak mewakili kepentingan lokal. Ketegangan ini semakin besar ketika militer turut terlibat, seperti kehadiran Batalyon 710 yang kemudian diketahui memiliki pengaruh terhadap gerakan DI/TII.

Keterkaitan antara tulisan Barbara Harvey dengan penelitian skripsi mengenai transmigrasi orang Jawa di Wonomulyo terletak pada pemahaman mendalam terhadap konteks sosial-politik lokal dan nasional yang membentuk situasi yang dihadapi oleh para transmigran. Tulisan tersebut menjadi penting untuk menjelaskan latar belakang munculnya kekerasan dan pemberontakan, serta mengapa kelompok-kelompok tertentu seperti masyarakat transmigran mampu bertahan, meskipun berada dalam kondisi yang sangat rawan dan tidak menguntungkan secara politik maupun sosial.

²⁵ Barbara Harvey. *Pemberontakan Kahar Muzakkar Dari Tradisi Ke DI/TII*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti 1989.

Skripsi Andi Putra Nur Alim yang berjudul "*Pemukiman Transmigran Jawa di Tanah Mandar 1937–1980*" merupakan salah satu sumber kajian akademik yang sangat penting dan relevan dalam memahami sejarah sosial, migrasi, dan dinamika kebijakan transmigrasi di wilayah Sulawesi Barat, khususnya Tanah Mandar, di mana Kecamatan Wonomulyo berada. Penelitian ini memiliki nilai historiografis yang kuat karena tidak hanya mencatat peristiwa migrasi secara kronologis, tetapi juga memetakan proses sosial, ekonomi, dan budaya yang menyertai kehadiran orang Jawa di wilayah tersebut selama lebih dari empat dekade.²⁶

Salah satu aspek utama yang menjadikan skripsi ini sangat relevan untuk penelitian mengenai transmigrasi orang Jawa di Wonomulyo pada 1950–1970 adalah kedalaman kajian historis yang mencakup konteks lokal secara spesifik. Masih jarang ditemukan kajian akademik yang secara langsung membahas secara mendalam sejarah migrasi ke Tanah Mandar dari perspektif lokal, dan tulisan ini mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan penjelasan yang luas dan mendalam mengenai proses transmigrasi berlangsung sejak masa kolonial Belanda (dimulai tahun 1937), melewati masa kemerdekaan, hingga pada masa menuju negara pascakolonial, termasuk periode 1950–1970 yang menjadi fokus banyak studi pembangunan nasional.

Dalam skripsi ini, Andi Putra Nur Alim menunjukkan kebijakan transmigrasi yang diterapkan di Tanah Mandar melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan. Ia tidak hanya menganalisis peran pemerintah pusat dalam mengatur perpindahan penduduk dari Jawa ke Sulawesi, tetapi juga memerhatikan interaksi sosial antara transmigran dan masyarakat lokal membentuk wajah baru Tanah Mandar. Ini sangat penting dalam konteks Wonomulyo, yang merupakan salah satu kawasan transmigrasi paling awal dan paling berhasil secara ekonomi maupun sosial di Sulawesi Barat. Dengan menganalisis hubungan antara kebijakan negara dan

²⁶ Andi Putra N. Alim. *Pemukiman Transmigran Jawa di Tanah Mandar*. Makassar: *Skripsi*, Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Hasanuddin University). 2020.

respon lokal, skripsi ini menawarkan pendekatan yang kontekstual dan tidak semata-mata teknokratik terhadap persoalan transmigrasi.

Salah satu kontribusi penting dari skripsi ini adalah penekanan pada dinamika adaptasi sosial-budaya. Kehadiran orang Jawa di Wonomulyo bukan hanya membawa perubahan dalam struktur agraris dan ekonomi lokal, tetapi juga memperkenalkan pola kehidupan baru yang mencerminkan nilai-nilai dari Jawa seperti kerja kolektif (gotong royong), praktik keagamaan, dan sistem pengelolaan pertanian yang lebih terorganisir. Semua perubahan ini berinteraksi secara langsung dengan masyarakat lokal yang memiliki latar budaya Mandar yang kuat. Skripsi ini menggambarkan bahwa proses transmigrasi tidak bersifat satu arah, tetapi merupakan hasil dari pertukaran sosial yang intens, yang terkadang juga menimbulkan ketegangan, resistensi, dan negosiasi identitas.

Selain itu, skripsi ini juga memperlihatkan bahwa keberhasilan program transmigrasi di Wonomulyo tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografis, dukungan administratif, dan respons masyarakat lokal. Dalam konteks tahun 1950–1970, masa ketika Indonesia sedang giat-giatnya membangun identitas nasional dan menata kembali struktur kewilayahan pasca-RIS, skripsi ini menjelaskan bahwa Wonomulyo dijadikan sebagai wilayah strategis oleh negara untuk menyebarkan penduduk dari Pulau Jawa ke wilayah yang relatif kurang padat penduduknya namun memiliki potensi pertanian yang besar. Penjelasan ini sangat berguna untuk mendukung argumen dalam penelitian yang menelaah transmigrasi sebagai bagian dari kebijakan pembangunan dan integrasi nasional.

Relevansi sumber literatur terakhir yaitu buku karya Sri Edi Swasono dan Masri Singarimbun yang berjudul “Transmigrasi di Indonesia tahun 1905-1985. Dalam buku ini, penulis membagi topik menjadi beberapa bagian yang mencakup latar belakang sejarah, pelaksanaan program, serta evaluasi dampaknya. Buku transmigrasi ini tidak hanya mencatat keberhasilan program transmigrasi, tetapi juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi,

seperti masalah integrasi sosial, keberlangsungan ekonomi, dan dampak lingkungan. Meskipun transmigrasi berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam praktiknya sering menemui kendala, termasuk stigma negatif dan penolakan dari masyarakat lokal. Salah satu kelebihan buku ini adalah pendekatannya yang holistik dan analitis, dilengkapi dengan data statistik dan grafik yang memperkuat argumen.²⁷

1.6.2 Landasan Konseptual

Transmigrasi adalah kebijakan pemerintah Indonesia untuk menyeimbangkan distribusi penduduk dan membuka peluang pembangunan ekonomi di wilayah yang masih jarang penduduk. Salah satu daerah yang dijadikan tujuan transmigrasi adalah Kecamatan Wonomulyo di Kabupaten Polewali Mandar, yang memiliki potensi lahan cukup luas untuk pengembangan wilayah. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya mengatasi kepadatan di wilayah padat penduduk sekaligus membuka peluang ekonomi bagi transmigran dan masyarakat setempat.

Kebijakan transmigrasi di Kecamatan Wonomulyo tidak hanya sekadar memindahkan penduduk, tetapi juga bertujuan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran transmigrasi dalam pengembangan wilayah serta menganalisis dampak sosial ekonomi bagi para transmigran dan masyarakat lokal di Wonomulyo. Transmigrasi merupakan program pemindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang jarang penduduk, dengan tujuan pemerataan penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lahan dan peluang ekonomi. Tujuan utamanya adalah pemerataan penduduk dan peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pemanfaatan lahan baru.

²⁷ Sri Swasono Edi, Masri Singarimbun. *“Transmigrasi Di Indonesia 1905-1985”*. Jakarta: UI Press 1986.

Di Kecamatan Wonomulyo, transmigrasi tidak hanya menjadi program relokasi penduduk, melainkan pendekatan pengembangan wilayah yang berfokus pada peningkatan produktivitas ekonomi melalui pembukaan lahan pertanian dan pengembangan infrastruktur. Dengan demikian, transmigrasi di sini berperan sebagai instrumen penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru yang berkelanjutan. Program transmigrasi di Wonomulyo berhasil mengurangi kepadatan di wilayah asal penduduk. Transmigran diberikan kesempatan untuk mengelola lahan baru dan mengembangkan usaha di sektor pertanian guna mendukung ketahanan pangan lokal. Namun, penting untuk memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam pelaksanaan transmigrasi ini, khususnya dalam mengelola sumber daya alam dengan bijak agar tidak terjadi degradasi lingkungan yang dapat menghambat pertumbuhan jangka panjang.

Dilihat dari sisi militer, khususnya satuan seperti Batalyon 710 yang telah banyak melalui berbagai penugasan penting ke daerah-daerah konflik, kita perlu memahami bahwa secara mental pasukan Batalyon 710 terkadang harus menghadapi tekanan yang tidak mudah untuk dilalui. Mereka dituntut untuk selalu siap secara fisik dan mental, namun pada saat yang sama seringkali harus berhadapan dengan kenyataan hidup yang keras fasilitas terbatas, jauh dari keluarga, hingga tekanan komando yang sering kali bersifat satu arah tanpa membuka ruang untuk berdiskusi. Ketika mereka ditempatkan bertugas di wilayah seperti Wonomulyo, yang secara administratif memang bukan daerah konflik aktif, tapi menyimpan banyak potensi ketegangan sosial, maka bukan hal yang mengejutkan jika akhirnya muncul perasaan yang sulit dikendalikan. Sehingga inilah yang kemudian mengambil bentuk sebagai aksi pemberontakan.

Sementara itu, masyarakat transmigran yang berada di wilayah yang sama justru memilih jalan yang berbeda mereka bertahan. Mereka tetap tinggal di lahan yang sudah mereka olah bertahun-tahun, meskipun kondisi di sekitar mereka sedang tidak stabil. Ini bukan karena mereka tidak merasa takut, atau karena mereka merasa aman. Justru karena mereka sudah tidak

punya pilihan lain, dan mereka sudah terlanjur menjadikan tanah itu sebagai satu-satunya tempat mereka bisa berharap. Banyak dari para transmigran ini datang dari wilayah asal yang lebih miskin, membawa mimpi akan kehidupan yang lebih baik. Dan setelah berjuang dari awal membuka lahan, membangun rumah, menciptakan komunitas mereka tentu tidak ingin meninggalkan semuanya begitu saja hanya karena ada gangguan keamanan dari tentara Batalyon 710.

Adanya kekuatan sosial yang luar biasa dari kelompok masyarakat kecil ini. Mereka mungkin tidak punya kekuatan politik, tidak memiliki kendali atas arah kebijakan yang diterapkan tapi mereka punya daya tahan. Mereka bertahan bukan karena situasi aman, tetapi karena harapan mereka sudah terikat erat di tanah itu. Ini adalah bentuk keteguhan yang muncul dari akar, keterikatan pada tempat, dari sejarah panjang perjuangan hidup, dan dari keinginan untuk melanjutkan apa yang sudah dimulai, meski jalannya tidak mudah.

Yang menarik, dua kelompok tersebut tentara Batalyon 710 dan masyarakat transmigran Jawa di Wonomulyo sebenarnya berada dalam tekanan yang sama, hanya saja meresponsnya dengan cara yang berbeda. Tentara Batalyon 710 melakukan pemberontakan karena tidak tahan lagi, sedangkan masyarakat memilih diam dan bertahan. Keduanya sama-sama memendam trauma sosial yang belum pulih. Di sinilah pentingnya kehadiran negara bukan hanya sebagai penegak disiplin atau keamanan, tapi sebagai penengah yang mampu merespon situasi dengan pertimbangan yang tepat, mendengar suara dari bawah, dan memberikan kesempatan untuk membangun pemahaman bersama serta pemulihan sosial.

Peristiwa yang terjadi di Wonomulyo adalah bagian kecil dari masalah besar yang mengakar dalam sistem kegagalan memahami manusia sebagai individu yang punya batas sabar dan hak untuk hidup layak. Ketika aparat dipaksa untuk tunduk tanpa ruang diskusi, dan masyarakat dibiarkan bertahan tanpa perlindungan nyata, maka kita sedang menciptakan

situasi penuh tekanan yang bisa terjadi kapan saja. Maka, dalam menyikapi pemberontakan tidak cukup dengan tindakan memberikan sanksi, tapi harus diketahui dan ditelusuri penyebabnya. Begitu juga dengan pilihan bertahan masyarakat transmigran di wilayah Wonomulyo, harus dipahami sebagai pertanda bahwa mereka tidak sekadar menunggu bantuan, tapi menunjukkan bahwa tanah itu sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Dengan pemahaman seperti ini, kita tidak sedang mencari siapa yang salah, tetapi sedang mencari apa yang perlu dibenahi. Karena pada akhirnya, baik tentara maupun masyarakat, sama-sama hanya ingin satu hal hidup yang lebih layak dan bermartabat.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian pada proposal ini penulis menggunakan kaidah teknik penulisan berdasarkan yang tercantum dalam buku Penulis Sejarah diantaranya terdiri dari Menentukan Permasalahan Sejarah, Melakukan Pencarian Sumber Sejarah, Menerapkan Kritik Sumber, Melakukan Interpretasi dan penulisan sejarah.

1. Menentukan Permasalahan Sejarah

Pada tahap ini penulis menentukan permasalahan sejarah apa yang akan ditulis. Permasalahan tersebut biasanya muncul dari rasa ingin tahu peneliti terhadap peristiwa masa lalu yang masih menjadi masalah di kalangan sejarawan seperti yang penulis angkat tentang Transmigrasi Orang Jawa di Kecamatan Wonomulyo 1950-1970. Penelitian tentang keberadaan transmigrasi di Kecamatan Wonomulyo memang sudah banyak yang menulis, tetapi kali ini penulis menggunakan gaya baru penulisan dalam menuliskan transmigrasi yang ada di Kecamatan Wonomulyo. Agar dalam menyusunnya penulis diperlukan merumuskan masalah secara spesifik, relevan, dan berdasarkan konteks sejarah yang dibahas. Selain itu, penulis juga harus mempertimbangkan ketersediaan sumber relevansi topik terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat masa kini serta masa yang akan datang. Sehingga nantinya penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya historiografi meskipun diawali dengan penelusuran sumber primer, sekunder, bahkan wawancara agar rumusan masalahnya tidak

hanya sebagai pedoman penelitian namun sebagai pendukung validitas data, objektivitas, serta signifikansi dari hasil penelitian.

2. Melakukan Pencarian Sumber Sejarah

Pada tahap ini penulis mengumpulkan sumber-sumber sejarah berupa penelusuran arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya ke Aster Kasdam XIV Hasanuddin Makassar untuk menelusuri dokumen-dokumen terdahulu bagi para transmigran Jawa di Kecamatan Wonomulyo, selanjutnya ke Perpustakaan Abdurrasyid Dg. Lurang untuk mencari buku-buku dan koran, kemudian ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Majene untuk mencari buku-buku sebagai referensi penulis, selanjutnya ke Kantor Kecamatan Wonomulyo dalam rangka penelusuran arsip, selanjutnya ke Kantor Desa Bumi Ayu untuk mencari arsip dokumen foto para transmigran Jawa dan juga ke kantor Desa Bumi Mulyo, dan terakhir melakukan wawancara dengan masyarakat keluarga transmigran Jawa di Kecamatan Wonomulyo. Selain itu, penulis juga mencari referensi di media online seperti Anri, Delpher, KITLV, National Archief, Harian Ekonomi Neraca, Newspaper SG, Khastara, dan sebagainya. Dalam hal ini penulis mengumpulkan sumber sejarah primer dan sekunder sebagai referensi untuk penyusunan penulisan proposal. Meskipun demikian, pada penulisan proposal ini penulis lebih banyak mendapatkan sumber lisan.

3. Menerapkan Kritik Sumber

Pada tahap ini penulis mulai mengevaluasi kredibilitas sebuah sumber informasi terhadap sumber-sumber yang telah di dapatkan baik primer maupun sekunder. Sumber primer yang dimaksud adalah dokumen asli, foto-foto, laporan saksi mata, catatan-catatan sedangkan sumber sekunder merupakan interpretasi dari sumber primer seperti buku-buku dan tulisan dalam jurnal, tesis, maupun skripsi. Adapun dua pendekatan untuk melakukan kritik suatu sumber yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal yang berfokus menganalisis isi

sumber terhadap tujuan penulis dalam menyampaikan informasi pada tulisan dirancangnya, dan kritik eksternal lebih kepada mengetahui bentuk fisik sebuah sumber dengan mempertimbangkan asal-usul penulis, konteks waktu, dan keaslian sumber. Kritik sumber ini digunakan untuk mengetahui tulisan dari sumber yang di dapatkan terdapat kejelasan dan membandingkannya dengan sumber lain sehingga dapat dipercaya. Agar penulis betul-betul teliti dalam penulisan karyanya.

4. Melakukan Interpretasi

Bagian ini merupakan penafsiran maupun analisis terhadap sumber-sumber yang telah di kritik sebelumnya. Interpretasi mengaitkan berbagai pendekatan ilmu-ilmu lain seperti sosial, budaya, ekonomi, politik, sosiologi, dan antropologi gunanya agar dapat menjelaskan peristiwa sejarah secara jelas sehingga penulis menjabarkannya secara kronologis. Dalam berbagai ilmu pengetahuan, interpretasi menjadi bagian penting untuk memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap suatu peristiwa mengungkap makna yang tersembunyi, dan mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data yang tersedia. Meskipun demikian, terdapatnya kesubjektifan dari hasil penafsiran penulis tetapi peristiwa sejarah tidak dapat diulangi lagi.

5. Penulisan Sejarah

Tahap ini merupakan langkah akhir penulis untuk merekonstruksi sebuah peristiwa sejarah terhadap karya tulisannya agar menghasilkan narasi yang informatif, relevan, dan bermakna. Penulisan sejarah tidak hanya berfokus dalam pemaparan peristiwa secara kronologis tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, budaya, politik, ekonomi yang melatarbelakangi peristiwa tersebut dan melakukan interpretasi akibat maupun dampak yang dihasilkan. Meskipun tujuannya untuk mencapai objektivitas, penulisan sejarah menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber olehnya itu diperlukan pendekatan kritis maupun metodologis yang kuat demi memastikan narasi yang dibangun tidak hanya akurat guna untuk memberikan pemahaman tentang memori kolektif kepada penulis.

1.8 Sistematika Penulisan

Bab I merupakan bagian dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang awal mula kolonisasi di Distrik Mapilli

Bab III membahas tentang transmigrasi orang Jawa di Kecamatan Wonomulyo dan awal dari pemberontakan

Bab IV membahas tentang dinamika sosial dan budaya masyarakat transmigran di Kecamatan Wonomulyo

Bab V penutup dari semua pembahasan dari bab 1 hingga bab 4 di dalamnya tercantum kesimpulan dari permasalahan yang penulis teliti.

BAB II

AWAL MULA KOLONISASI DI DISTRIK MAPILLI

2.1. Gambaran Umum Kecamatan Wonomulyo

2.1.1. Kondisi Geografis

Kecamatan Wonomulyo berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yakni Wonomulyo Dalam Angka tahun 2015 berada pada posisi 03°22'51,0 Lintang Utara dan 119° 12'36,4' Bujur Timur. Hal ini menandakan bahwa wilayah Kecamatan Wonomulyo, termasuk Kecamatan yang luas dibandingkan dengan beberapa Kecamatan lain dan tergolong Kecamatan terluas kedua dari 16 Kecamatan yang berada di Kabupaten Polewali Mandar.²⁸

²⁸ *Wonomulyo Dalam Angka 2015.*

Secara administrasi wilayah Kecamatan ini terbagi dalam 14 desa dan kelurahan tetapi hanya terdiri satu kelurahan selebihnya terdapat 13 desa. Adapun nama dari desa dan kelurahan antara lain, Bumiayu, Sidodadi, Kebunsari, Nepo, Arjosari, Sidorejo, Campurejo, Sugihwaras, Banuabaru, Sumberjo, Tumpiling, Bakka-bakka, dan Galesong. Sidodadi yang berdiri sebagai pusat kelurahan.

Dalam suatu wilayah tentunya mempunyai batas-batas dengan wilayah lainnya. Pada Kecamatan Wonomulyo sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tapango, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Matakali, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mapilli.

Foto 1:



Peta

Kecamatan Wonomulyo

(Sumber: BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2015)

Seperti kebanyakan wilayah lain di Indonesia, daerah Wonomulyo juga hanya mengalami dua musim sepanjang tahun, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Perubahan musim di wilayah ini sangat dipengaruhi oleh arah angin. Ketika angin bertiup dari wilayah Asia dan

Samudera Pasifik, yang membawa banyak kandungan uap air, maka hujan cenderung lebih sering turun. Umumnya, kondisi seperti ini terjadi antara bulan Januari hingga Juni. Sementara itu, saat angin berhembus dari arah Asia dan Samudra Pasifik yang cenderung kering karena minim uap air maka mulailah musim kemarau. Biasanya, musim kering ini berlangsung dari sekitar bulan Juli hingga Oktober.

Tingkat curah hujan di suatu daerah sebenarnya tidak lepas dari beberapa faktor, seperti kondisi iklim lokal, bentuk permukaan tanah, serta pergerakan dan pertemuan massa udara yang melewati wilayah tersebut. Karena itu, tidak mengherankan jika curah hujan di Wonomulyo pada tahun 2014 bervariasi setiap bulannya. Pada bulan April tahun itu tercatat sebagai bulan dengan curah hujan tertinggi, yaitu mencapai sekitar 306 milimeter dengan jumlah hari hujan sebanyak 18 kali. Sebaliknya, bulan Februari tercatat sebagai bulan dengan curah hujan terendah, hanya sekitar 14 milimeter.²⁹

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Wonomulyo hanya memiliki dua musim, curah hujannya bisa sangat berbeda-beda tergantung bulan dan pengaruh cuaca global. Hal ini tentunya sangat penting untuk diketahui, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada pertanian dan aktivitas yang sensitif terhadap perubahan musim.

2.1.2. Pekerjaan

Pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan arah dan kecepatan kemajuan suatu wilayah. Tanpa adanya perencanaan, kebijakan, serta pelaksanaan program-program yang maksimal dari pihak pemerintah, sebuah daerah akan sulit berkembang secara optimal. Olehnya itu, pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyusun strategi pembangunan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian.

²⁹ *Wonomulyo Dalam Angka 2015.*

Agar program-program dari pemerintah bisa berjalan lancar sampai ke tingkat paling bawah dan supaya pelayanan kepada warga jadi lebih cepat dan mudah, maka di setiap desa yang ada di Kecamatan Wonomulyo dibentuk sistem administrasi yang lebih kecil. Sistem ini berupa pembagian wilayah desa menjadi dusun-dusun dan Rukun Tetangga (RT). Jadi, dusun dan RT ini dibuat sebagai bagian dari desa, tapi tugasnya lebih dekat langsung ke masyarakat.

Kemajuan sebuah desa sangat bergantung pada dua hal penting, yaitu seberapa besar keterlibatan warganya dan seberapa cakap pemimpin desanya dalam mengelola berbagai urusan. Permasalahan ini tentu bisa berbeda-beda standar penilaiannya, namun salah satu hal yang sering dijadikan tolak ukur adalah latar belakang pendidikan pemimpinnya. Di wilayah Kecamatan Wonomulyo, kepala desa memiliki tingkat pendidikan yang bervariasi ada yang lulusan SMA, ada juga yang sudah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana.

Tingkat pendidikan ini bisa memberi pengaruh besar terhadap cara mereka mengambil keputusan, berkomunikasi dengan masyarakat, serta menjalankan program-program yang ada. Selain kepala desa, dalam menjalankan roda pemerintahan dan memberi pelayanan kepada warga, tentu dibutuhkan aparatur yang bekerja secara administratif maupun teknis. Di Kecamatan Wonomulyo sendiri, tercatat ada sekitar 195 pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di berbagai instansi pemerintahan. Para PNS inilah yang membantu kelancaran tugas-tugas pelayanan publik, baik di bidang administrasi, pendidikan, kesehatan, maupun sektor lainnya.³⁰

Dengan jumlah tenaga kerja tersebut dan ditambah dukungan dari masyarakat, maka pembangunan desa bisa lebih efektif, selama ada kerjasama antara warga, aparat, dan pemimpin desa itu sendiri.

2.1.3. Penduduk

³⁰ *Wonomulyo Dalam Angka 2015*

Penduduk adalah setiap orang yang tinggal menetap di suatu wilayah, baik sudah tinggal selama enam bulan lebih, maupun baru beberapa waktu saja tetapi memang berniat untuk tinggal dalam jangka panjang. Jadi, bukan hanya soal lamanya tinggal, tapi juga soal niat untuk menetap. Data jumlah penduduk seperti ini sangat penting, terutama ketika pemerintah ingin merancang program pembangunan atau mengevaluasi kemajuan yang sudah berjalan. Karena pada akhirnya, pembangunan itu dibuat oleh manusia dan untuk manusia itu sendiri. Artinya, masyarakat adalah pelaku utama sekaligus penerima manfaat dari hasil pembangunan.

Berdasarkan pendataan jumlah penduduk di tahun 2014, total penduduk Kecamatan Wonomulyo saat itu tercatat sebanyak 47.631 jiwa. Kalau digabungkan, jumlah laki-laki mencapai sekitar 23.524 orang, sementara perempuan sedikit lebih banyak, yaitu 24.107 jiwa. Selisih antara jumlah laki-laki dan perempuan ini juga bisa dilihat dari angka rasio jenis kelamin yang berada di angka 97,58. Artinya, dalam setiap 100 orang perempuan, ada sekitar 97 sampai 98 laki-laki. Ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan memang sedikit lebih tinggi di wilayah tersebut.³¹

Luas wilayah Kecamatan Wonomulyo sendiri sekitar 72,82 kilometer persegi. Kalau dihitung, maka kepadatan penduduknya berada di angka sekitar 654 orang setiap kilometer persegi. Tapi tentu saja, kepadatan itu tidak sama rata di semua desa. Misalnya, Kelurahan Sidodadi termasuk yang paling padat, dengan jumlah penduduk per kilometer persegi mencapai 3.765 orang. Sedangkan Desa Galeso berada di sisi sebaliknya, yaitu sebagai desa dengan tingkat kepadatan paling rendah, hanya sekitar 149 orang per kilometer persegi.

Sementara itu, jika dilihat dari segi struktur rumah tangga, rata-rata satu rumah tangga di Wonomulyo terdiri dari sekitar 4 sampai 5 orang. Lebih tepatnya, angkanya berada di sekitar

³¹ *Wonomulyo Dalam Angka 2015*

4,2 orang per keluarga. Ini menunjukkan bahwa mayoritas keluarga di daerah ini berukuran sedang, tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar.

Di wilayah Kecamatan Wonomulyo, sebaran jumlah penduduk di setiap desa dan kelurahan tidaklah merata. Kelurahan Sidodadi merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk paling tinggi, yakni mencapai sekitar 10.918 orang. Sementara itu, Desa Bakka-Bakka tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit, hanya sekitar 1.587 jiwa. Perbedaan ini menggambarkan bahwa tingkat kepadatan dan konsentrasi penduduk sangat bervariasi, tergantung pada lokasi, fasilitas, dan mungkin juga potensi ekonomi dari masing-masing desa atau kelurahan.

Kalau kita melihat lebih dalam masalah pertumbuhan jumlah penduduk di Kecamatan Wonomulyo, ada tiga hal utama yang menjadi faktor penentu. Pertama adalah angka kelahiran, kedua adalah angka kematian, dan yang ketiga adalah arus perpindahan penduduk, baik yang datang ke wilayah ini maupun yang pindah keluar. Data administrasi kependudukan menunjukkan bahwa selama tahun 2014, jumlah bayi yang lahir di Kecamatan Wonomulyo mencapai 264 jiwa. Di sisi lain, pada tahun yang sama, tercatat sebanyak 163 orang meninggal dunia.

Selain itu, mobilitas penduduk juga cukup terasa. Tercatat ada sekitar 160 orang yang pindah masuk ke Kecamatan Wonomulyo selama tahun tersebut. Namun, jumlah warga yang meninggalkan wilayah ini justru lebih besar, yaitu sekitar 371 orang. Ini menunjukkan bahwa selain pertumbuhan alami melalui kelahiran, faktor keluar-masuk penduduk juga berpengaruh besar terhadap dinamika jumlah penduduk di wilayah ini.

Secara keseluruhan, angka-angka tersebut bisa menjadi gambaran perkembangan penduduk di Wonomulyo tidak hanya ditentukan oleh faktor alami seperti kelahiran dan

kematian, tetapi juga oleh kondisi sosial dan ekonomi yang mendorong seseorang untuk datang atau pergi dari wilayah tersebut.

2.1.4. Komoditas

Dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Wonomulyo, sektor pertanian masih menjadi andalan utama. Bisa dibayangkan, mayoritas masyarakat menggantungkan hidupnya dari aktivitas bertani. Hal ini karena sektor pertanian, meskipun sederhana, justru dianggap paling kuat dalam menghadapi situasi ekonomi yang sulit. Berbeda dengan sektor lain yang mudah terpengaruh oleh kondisi global, pertanian cenderung lebih stabil dan tidak terlalu terdampak oleh faktor-faktor luar seperti fluktuasi pasar atau krisis ekonomi.

Selain pertanian, bidang peternakan juga mendapat perhatian besar. Pemerintah mendorong agar jumlah ternak bisa terus ditingkatkan, baik dari sisi populasi maupun hasil produksinya. Tujuannya jelas: supaya kebutuhan daging, baik untuk konsumsi lokal maupun antarwilayah, bisa terpenuhi. Berdasarkan data yang ada, populasi sapi di Kecamatan Wonomulyo mencapai lebih dari 3.500 ekor, kambing sekitar 2.600 ekor, dan kuda pun masih ada meskipun tidak banyak, hanya sekitar 90 ekor. Di luar itu, unggas seperti ayam dan itik berkembang pesat. Ayam kampung dan ayam ras jumlahnya ratusan ribu ekor, yang tentu menjadi sumber utama protein hewani warga sekitar.³²

Selain beternak, warga Wonomulyo juga aktif menanam sayuran. Beberapa jenis yang umum ditanam antara lain bayam, kangkung, sawi, cabe, tomat, terong, kacang panjang, dan ketimun. Hasil panennya cukup menjanjikan, karena sayuran-sayuran ini dibutuhkan hampir setiap hari, baik untuk kebutuhan sendiri maupun dijual ke pasar.

Sektor lain yang juga mendukung ekonomi masyarakat adalah perikanan. Masyarakat memanfaatkan tambak, kolam, sawah, bahkan rawa untuk budidaya ikan. Luas tambak di

³² *Wonomulyo Dalam Angka 2015*

daerah ini cukup besar, mencapai ribuan hektar, dan hasil produksinya pun tinggi. Untuk budidaya laut, kolam air tawar, hingga perikanan darat dari sawah dan rawa, semuanya memberikan sumbangan besar terhadap kebutuhan protein hewani dan pemasukan masyarakat. Melihat luasnya cakupan dan manfaat dari sektor ini, tidak heran jika pembangunan pertanian dianggap sebagai dasar utama dalam menggerakkan perekonomian daerah. Baik itu pertanian pangan, peternakan, perkebunan, maupun perikanan, semuanya saling berkaitan dan mendukung satu sama lain.

Lahan pertanian di Wonomulyo sendiri lebih banyak dimanfaatkan untuk sawah. Tanaman padi menjadi komoditas paling penting. Setiap tahun, ribuan hektar sawah ditanami padi dan menghasilkan puluhan ribu ton gabah. Ini menjadi sumber pangan utama sekaligus penopang ekonomi banyak keluarga. Tidak hanya itu, sektor perkebunan juga berkembang cukup baik. Kelapa dalam adalah salah satu komoditas unggulan dengan hasil panen tinggi. Di sisi lain, tanaman seperti kakao dan sagu juga dibudidayakan meskipun hasilnya tidak sebanyak kelapa. Namun, tetap menjadi bagian penting dalam diversifikasi hasil perkebunan masyarakat.

Di Kecamatan Wonomulyo, pasar memegang peranan penting sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang maupun jasa. Dari total 14 desa dan kelurahan yang ada, hanya ada dua lokasi yang memiliki pasar tradisional yang aktif, yakni di Desa Kebunsari dan Kelurahan Sidodadi. Pasar di kedua tempat ini buka secara rutin dua kali dalam satu minggu. Selain itu, di Kelurahan Sidodadi juga terdapat pasar hewan yang menjadi tempat khusus untuk perdagangan hewan ternak.

Selain pasar tradisional tersebut, masyarakat juga memiliki akses ke pasar yang lebih modern seperti swalayan dan toko-toko yang menyediakan berbagai kebutuhan harian secara lengkap. Kios-kios kecil dan pedagang yang menjajakan berbagai barang bisa ditemui hampir di seluruh desa dan kelurahan, sehingga kebutuhan sehari-hari warga cukup mudah terpenuhi.

Tak hanya itu, fasilitas pendukung seperti bengkel kendaraan dan layanan servis elektronik juga tersebar di berbagai titik, membantu mempermudah aktivitas perdagangan dan pelayanan umum.

Perdagangan di wilayah ini menjadi salah satu pilar utama yang menggerakkan roda ekonomi. Wonomulyo sendiri menjadi jalur strategis penghubung antarprovinsi dan kabupaten, sehingga fasilitas perdagangan dan penginapan cukup memadai untuk menunjang kegiatan tersebut. Karena pasar tradisional di setiap desa atau kelurahan biasanya hanya buka sekali atau dua kali dalam seminggu, para pedagang cenderung berpindah-pindah dari satu pasar ke pasar lain agar dapat menjual dagangan mereka secara merata. Barang yang dijual tidak hanya barang kebutuhan sehari-hari, tetapi juga hasil-hasil pertanian dari masyarakat sekitar.

Mengenai koperasi, walaupun secara hukum koperasi sudah diatur sebagai lembaga yang sangat sesuai dengan prinsip ekonomi negara kita, namun peran koperasi di tingkat masyarakat Wonomulyo masih tergolong kecil. Oleh karena itu, pengembangan koperasi agar lebih aktif dan kuat menjadi hal yang penting. Sampai tahun 2013, tercatat hanya ada lima koperasi non-KUD yang tersebar di tiga desa saja, yaitu Bumiayu, Sidorejo, dan Sugihwaras.

2.1.5. Infrastruktur

Selanjutnya agar pergerakan kendaraan dan mobilitas penduduk di Kecamatan Wonomulyo berjalan lancar, sangat penting tersedianya fasilitas transportasi yang cukup memadai. Hal ini bertujuan untuk mempermudah perpindahan antar desa maupun kelurahan dalam wilayah kecamatan, serta koneksi menuju daerah-daerah sekitar di kecamatan lain. Selain jaringan jalan, alat transportasi darat juga diperlukan sebagai sarana pengangkutan baik untuk barang maupun penumpang.

Sebagai salah satu kecamatan utama di Kabupaten Polewali Mandar yang berada di wilayah daratan, Wonomulyo memiliki sistem jalan yang relatif baik. Semua desa dan kelurahan di sini

dapat diakses dengan kendaraan darat, baik untuk perjalanan di dalam satu desa maupun antar desa di kecamatan tersebut.

Selain infrastruktur fisik, kelancaran pembangunan daerah juga sangat tergantung pada tersedianya fasilitas komunikasi dan informasi yang efektif dan cepat. Oleh karena itu, keberadaan fasilitas seperti kantor pos dan warnet menjadi sangat penting untuk menunjang kebutuhan komunikasi masyarakat dan pemerintah daerah. Pelaksanaan berbagai program pemerintah dan proses pembangunan akan berjalan dengan baik jika didukung oleh pendanaan yang cukup memadai. Salah satu sumber dana utama bagi pemerintah di Kecamatan Wonomulyo adalah pendapatan dari pajak daerah. Salah satu jenis pajak yang dipungut adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang dikumpulkan dari seluruh desa dan kelurahan di wilayah kecamatan. Setiap desa dan kelurahan memiliki target penerimaan PBB yang harus disetorkan kepada pemerintah kabupaten setiap tahunnya.

Jumlah warga yang wajib membayar pajak di Wonomulyo mencapai lebih dari dua puluh dua ribu orang, tersebar di empat belas desa dan kelurahan. Kelurahan Sidodadi menjadi wilayah dengan jumlah wajib pajak terbanyak, mencapai hampir tiga ribu wajib pajak, dan juga mencatat penerimaan pajak tertinggi, yang mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, Desa Bakka-bakka memiliki jumlah wajib pajak paling sedikit dan penerimaan pajaknya pun terbilang paling rendah di antara desa dan kelurahan lain.³³

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak untuk mendukung pembangunan daerah. Bahkan dalam beberapa tahun, pendapatan dari pajak ini seringkali melebihi target yang ditetapkan sebelumnya. Selain itu, peran lembaga keuangan, terutama bank, sangat vital dalam mendukung kegiatan ekonomi di kecamatan ini. Bank-bank yang ada, baik yang dimiliki

³³ *Wonomulyo Dalam Angka 2015*

pemerintah maupun swasta, membantu mengalirkan dana masyarakat ke berbagai sektor produktif serta mempermudah transaksi keuangan sehari-hari.

Untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung yang datang ke wilayah Kecamatan Wonomulyo, keberadaan tempat menginap seperti hotel dan losmen sangatlah diperlukan. Saat ini, di daerah tersebut tersedia beberapa fasilitas penginapan, yakni tiga hotel dan dua losmen yang melayani para tamu dengan baik. Selain fasilitas penginapan, Kecamatan Wonomulyo juga memiliki tempat wisata yang cukup dikenal, yaitu Pantai Mampie. Pantai ini terletak di bagian selatan ibu kota kecamatan, tepatnya di Desa Galeso. Tempat wisata ini menjadi favorit masyarakat, terutama ketika hari libur, tidak hanya dari dalam kecamatan saja tetapi juga dari daerah sekitar. Perkembangan layanan penginapan serta restoran dan warung makan tidak hanya memudahkan wisatawan, tetapi juga berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi yang lebih luas. Kehadiran fasilitas-fasilitas tersebut ikut membantu memajukan perdagangan dan berbagai sektor ekonomi lainnya di kawasan tersebut.

2.1.6. Kesenian

Selain itu, Kecamatan Wonomulyo juga dikenal dengan keberagaman seni tradisional yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan kreativitas mereka. Pada tahun 2015, tercatat adanya beragam kelompok seni di berbagai desa dan kelurahan, seperti seni rebana sebanyak 15 kelompok, kasida 12 kelompok, kuda lumping 5 kelompok, gambus dan campur sari masing-masing 2 kelompok, serta wayang kulit dan kesenian sayang-sayang yang masing-masing memiliki satu kelompok.³⁴

Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial memiliki peran yang sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai tanggung jawab sosial yang mereka emban. Selain itu, pembangunan ini bertujuan agar masyarakat memiliki kemampuan yang cukup

³⁴ *Wonomulyo Dalam Angka 2015.*

dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meningkatnya kesadaran dan kemampuan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan itu sendiri. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung keberlanjutan program-program sosial yang mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, agama, kesehatan, keluarga berencana, keamanan dan ketertiban, hingga kegiatan sosial lain yang memperkuat jaringan sosial dan solidaritas antar warga.

Sesuai dengan mandat dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), salah satu fokus utama pembangunan adalah pada sektor pendidikan. Upaya ini diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan serta perluasan akses belajar di seluruh jenjang, dari Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas. Peningkatan mutu pendidikan ini penting agar generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Perluasan kesempatan belajar juga sangat penting, terutama mengingat jumlah penduduk usia sekolah yang terus meningkat setiap tahun seiring pertumbuhan penduduk secara umum. Untuk itu, pemerintah berupaya menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta merata di seluruh wilayah Kecamatan Wonomulyo.

Data terbaru menunjukkan bahwa terdapat sekitar 62 unit fasilitas pendidikan yang tersebar di berbagai desa dan kelurahan. Rinciannya meliputi 12 Taman Kanak-Kanak, 34 Sekolah Dasar, 11 Sekolah Menengah Pertama, dan 5 Sekolah Menengah Atas. Hampir di setiap desa dan kelurahan, tersedia setidaknya satu Sekolah Dasar sebagai tempat anak-anak memulai pendidikan formal mereka. Kelurahan Sidodadi merupakan wilayah dengan jumlah Sekolah Dasar negeri terbanyak, yaitu lima unit, sementara beberapa desa lain seperti Galeso dan Tumpiling memiliki tiga unit. Desa-desanya lain seperti Nepo, Arjosari, Bumimulyo, Sidorejo, dan Sugihwaras masing-masing memiliki dua Sekolah Dasar negeri. Desa yang hanya memiliki

satu unit Sekolah Dasar negeri di antaranya adalah Kebunsari, Bumiayu, Campurejo, Banua Baru, dan Bakka-bakka.³⁵

Di samping pendidikan, sektor kesehatan juga mendapat perhatian serius dalam upaya pembangunan. Fokus utama dalam bidang ini adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat sehingga angka kematian akibat penyakit dapat ditekan seminimal mungkin. Selain itu, diupayakan agar seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang merata, tanpa terkecuali. Pada tahun 2014, Kecamatan Wonomulyo memiliki sebanyak 71 unit fasilitas kesehatan yang terdiri dari puskesmas dan pustu, serta dukungan tambahan berupa pos kesehatan desa (poskesdes) dan pos pelayanan terpadu (posyandu) yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan. Keberadaan fasilitas ini sangat penting sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan cepat.³⁶

Pembangunan dalam bidang agama diarahkan untuk menciptakan suasana yang harmonis dan damai antar umat beragama. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan antar manusia, tetapi juga meliputi hubungan manusia dengan Sang Pencipta serta dengan lingkungan sekitar. Keberagaman agama yang dianut oleh penduduk Kecamatan Wonomulyo tercermin dari banyaknya fasilitas tempat ibadah yang ada di wilayah ini. Tercatat sebanyak 81 masjid yang menjadi pusat kegiatan umat Islam, 9 musholla sebagai tempat ibadah yang lebih kecil, dan 5 gereja yang melayani umat Kristen di daerah tersebut. Keberadaan tempat ibadah yang beragam ini menunjukkan bahwa masyarakat hidup berdampingan dengan penuh toleransi dan saling menghormati keyakinan masing-masing.

³⁵ *Wonomulyo Dalam Angka 2015.*

³⁶ *Wonomulyo Dalam Angka 2015*

Selain itu, pembangunan sosial lainnya diarahkan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera baik dari sisi materi maupun spiritual. Fokus utama adalah menangani berbagai persoalan sosial yang seringkali menjadi hambatan dalam pembangunan, seperti kemiskinan, keterbelakangan, anak-anak terlantar, serta masalah kerawanan sosial dan bencana alam. Pemerintah juga berupaya membangkitkan semangat dan gairah sosial melalui pendidikan nonformal dan pelatihan keterampilan yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat agar lebih mandiri dan produktif. Dengan cara ini, diharapkan dapat terwujud kehidupan sosial yang harmonis, berwawasan luas, serta memiliki sikap positif yang mendorong kemajuan di berbagai sektor kehidupan.

Secara keseluruhan, pembangunan kesejahteraan sosial di Kecamatan Wonomulyo mengedepankan sinergi antara berbagai elemen masyarakat dan pemerintah. Kerjasama yang erat antara masyarakat, organisasi sosial, lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, serta aparat pemerintah menjadi kunci utama agar program-program pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang optimal. Pendekatan yang menyeluruh dan terpadu diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan sosial yang dihadapi, sekaligus membangun masyarakat yang lebih kuat, mandiri, dan sejahtera dalam jangka panjang.

2.2. Orang Jawa Kolonisasi Ke Mandar (Di Distrik Mapilli)

Munculnya kebijakan Politik Etis pada awal abad ke-20 tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah panjang penjajahan Belanda di wilayah Hindia Belanda, terutama akibat dampak negatif dari dua kebijakan ekonomi besar yang telah diterapkan sebelumnya: sistem tanam paksa (Culture Stelsel) dan politik liberal. Kedua kebijakan ini, yang secara berturut-

turut berlangsung pada periode 1830–1870 dan 1870–1900, meninggalkan jejak eksploitasi yang dalam terhadap masyarakat pribumi, khususnya di Pulau Jawa.³⁷

Sistem tanam paksa yang diperkenalkan oleh Johannes van den Bosch pada tahun 1830 bertujuan untuk mengisi kas negara Belanda yang mengalami krisis keuangan. Dalam pelaksanaannya, sistem ini mewajibkan para petani di Jawa untuk menanam komoditas ekspor seperti kopi, gula, dan nila pada sebagian besar lahan pertanian mereka. Hasil dari tanaman tersebut kemudian disetorkan kepada pemerintah kolonial untuk dijual ke pasar Eropa. Meskipun sistem ini membawa keuntungan besar bagi Belanda, terutama dalam hal pendapatan negara, rakyat Jawa yang menjadi tulang punggung produksi justru hidup dalam penderitaan. Tanah pertanian untuk kebutuhan pangan mereka sendiri berkurang drastis, sementara beban kerja meningkat tanpa imbalan yang sepadan. Kelaparan, kemiskinan, dan kematian akibat kekurangan pangan menjadi fenomena yang menyedihkan dalam periode ini.³⁸

Setelah sistem tanam paksa dihentikan, Belanda menerapkan kebijakan baru yang dikenal sebagai politik liberal. Dalam masa ini, pemerintah kolonial memberikan ruang seluas-luasnya bagi perusahaan swasta Eropa untuk menjalankan aktivitas ekonomi di wilayah jajahan. Para investor dan pengusaha asing diberikan hak istimewa atas tanah dan tenaga kerja lokal. Ironisnya, meskipun kebijakan ini diklaim sebagai bentuk pembebasan ekonomi, dalam kenyataannya hanya memperluas akses eksploitasi terhadap kekayaan alam dan tenaga kerja rakyat Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda bersikap tertutup, menyerahkan urusan ekonomi kepada mekanisme pasar yang ternyata hanya menguntungkan kalangan elit Eropa. Kaum

³⁷ J. S. Furnival. *Hindia Belanda: Studi Tentang Ekonomi Majemuk*, (Jakarta: Freedom Institute. 2009): 127-128.

³⁸ J. S. Furnival *Hindia Belanda:...*(2009): 177-178.

pribumi tetap berada dalam posisi yang tertindas, dengan sedikit atau bahkan tanpa peluang untuk memperbaiki taraf hidup mereka.³⁹

Situasi ini pada akhirnya menimbulkan kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk dari sebagian masyarakat Belanda sendiri yang mulai mempertanyakan moralitas dari sistem penjajahan tersebut. Salah satu suara yang paling berpengaruh datang dari Conrad Theodor van Deventer, seorang tokoh yang pernah menjadi penasihat hukum di Hindia Belanda. Van Deventer menyatakan bahwa Belanda memiliki utang moral kepada bangsa Indonesia, khususnya rakyat Jawa, yang selama berpuluh-puluh tahun telah diperas kekayaan dan tenaganya demi kemakmuran negeri penjajah. Van Deventer mengusulkan bahwa sudah sepatutnya utang ini dibayar bukan dalam bentuk uang, tetapi melalui kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat jajahan.⁴⁰

Dari pemikiran inilah lahir kebijakan Politik Etis, yang pada dasarnya merupakan sebuah bentuk tanggung jawab moral pemerintah kolonial untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi penduduk pribumi. Kebijakan ini dirumuskan dalam tiga program utama, edukasi (penyediaan pendidikan bagi rakyat pribumi), irigasi (pembangunan dan perbaikan saluran pengairan untuk pertanian), dan transmigrasi (pemindahan penduduk dari daerah yang padat ke wilayah yang lebih jarang penduduknya untuk mengurangi beban lahan dan sumber daya).

Namun demikian, pelaksanaan Politik Etis tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Sebagian besar program-program tersebut masih dijalankan dengan pendekatan dan kental dengan kepentingan kolonial. Pendidikan yang diberikan, misalnya, lebih diarahkan untuk mencetak tenaga kerja terampil yang dibutuhkan oleh administrasi kolonial, bukan untuk

³⁹ Regerings Alamanak 1938 Voor Nederlandsch Indie. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.

⁴⁰ Edwar Poelinggomang. Dkk. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2*, (Sulawesi Selatan: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sulawesi Selatan. 2005). Hal. 15.

membebaskan rakyat dari belenggu ketertinggalan atau membuka jalan menuju kemerdekaan. Golongan liberal yang mendukung kebijakan ini pun kerap kali tetap memandang rakyat pribumi sebagai objek, bukan sebagai subjek pembangunan. Di sisi lain, kalangan sosialis di Belanda memberikan kritik terhadap kebijakan kolonial yang tetap membuka ruang luas bagi kapitalisme swasta. Menurut mereka, kebijakan liberal yang berorientasi pada "perkembangan bebas perusahaan swasta" justru bertentangan dengan semangat keadilan sosial. Mereka menuntut agar prioritas utama diletakkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat pribumi secara materiil dan moral, serta mendukung desentralisasi pemerintahan dan pelibatan aktif masyarakat lokal dalam urusan kenegaraan.⁴¹

Dengan demikian, lahirnya Politik Etis merupakan hasil dari dinamika sejarah yang kompleks, yang diwarnai oleh ketimpangan sosial, tekanan moral dari dalam dan luar negeri, serta pergeseran pandangan di kalangan intelektual Belanda sendiri. Meski tujuan kebijakan ini secara ideal cukup mulia, kenyataannya tetap tidak lepas dari kepentingan politik kolonial dan belum sepenuhnya mampu mengangkat derajat hidup rakyat Indonesia secara menyeluruh. Akan tetapi, kebijakan ini tetap memiliki nilai historis yang penting, karena dari sinilah benih-benih kesadaran nasional mulai tumbuh, dan kaum terpelajar pribumi mulai muncul untuk kelak menjadi pemimpin dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Menjelang akhir tahun 1927, tepatnya pada tanggal 31 Desember, pemerintah kolonial Hindia Belanda dihadapkan pada persoalan serius yang menyangkut ketimpangan demografis dan potensi krisis sumber daya. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat, terutama di wilayah Jawa dan Madura, yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan administrasi kolonial. Data statistik yang dirilis pada

⁴¹ Ricklefs M.C. *Sejarah Indonesia Modern...*(2008): 480-483.

saat itu menunjukkan bahwa total populasi di seluruh wilayah Hindia Belanda telah mencapai lebih dari 52 juta jiwa, sebuah angka yang cukup signifikan untuk ukuran zaman tersebut.⁴²

Akan tetapi, masalah utama bukan hanya soal jumlah penduduk secara keseluruhan, melainkan soal distribusi yang sangat tidak merata antar wilayah. Dari total populasi tersebut, lebih dari 37 juta jiwa tinggal di wilayah Jawa dan Madura saja. Artinya, sekitar 70 persen penduduk Hindia Belanda terkonsentrasi di dua pulau tersebut. Kepadatan penduduk di kawasan ini mencapai sekitar 284 jiwa per kilometer persegi angka yang sangat tinggi, terutama jika dibandingkan dengan kondisi di pulau-pulau lain di luar Jawa dan Madura, yang hanya dihuni sekitar 15 juta jiwa dengan kepadatan rata-rata 8 jiwa per kilometer persegi. Ketimpangan ini menciptakan tekanan besar terhadap lahan, sumber daya alam, serta ruang hidup masyarakat di Jawa dan Madura.⁴³

Fenomena ini tidak hanya menimbulkan permasalahan lingkungan dan keterbatasan lahan pertanian, tetapi juga menjadi ancaman nyata terhadap kesejahteraan penduduk. Pada masa itu, sebagian besar masyarakat di Jawa menggantungkan hidup mereka pada sektor pertanian, yang terus mengalami tekanan akibat semakin sempitnya lahan garapan. Lahan-lahan pertanian keluarga terus menyusut karena terfragmentasi oleh penambahan generasi, sementara permintaan pangan terus meningkat seiring penambahan jumlah penduduk. Di banyak wilayah, petani tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan hidupnya dari lahan yang mereka miliki.

Kondisi ini mendorong sebagian besar penduduk untuk mencari alternatif penghidupan, termasuk bekerja di perkebunan milik swasta Eropa. Namun demikian, sektor perkebunan juga menghadapi keterbatasan dalam hal ekspansi, karena tanah-tanah yang tersedia untuk

⁴² Regerings Almanak 1938 Voor Nederlandsch Indie. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.

⁴³ Regerings Almanak 1938 Voor Nederlandsch Indie. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.

pengembangan usaha agrikultur skala besar semakin terbatas. Situasi ini mengakibatkan tekanan ganda terhadap masyarakat: di satu sisi mereka kehilangan akses terhadap lahan produktif, dan di sisi lain peluang kerja di sektor formal kolonial tidak cukup menampung besarnya jumlah tenaga kerja yang tersedia.⁴⁴

Di luar Pulau Jawa, justru terbentang lahan-lahan luas yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hutan-hutan primer dan wilayah subur terbuka lebar di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Namun karena keterbatasan infrastruktur, kurangnya investasi dari pemerintah kolonial, serta engganinya penduduk Jawa untuk berpindah ke wilayah-wilayah yang asing dan belum berkembang tersebut, maka lahan-lahan tersebut tetap tak terjamah secara ekonomi. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan gagasan mengenai transmigrasi sebagai solusi jangka panjang terhadap problem kepadatan penduduk di Jawa dan Madura. Namun, pada akhir dekade 1920-an, program semacam ini masih berada dalam tahap awal perumusan dan belum diimplementasikan secara luas.⁴⁵

Pemerintah kolonial Belanda pada akhirnya menyadari bahwa persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan kebijakan ekonomi semata. Masalah populasi yang tidak seimbang ini telah berubah menjadi krisis sosial yang lebih besar: menyangkut kemiskinan struktural, pengangguran terselubung, serta tekanan psikologis dan sosial pada masyarakat pedesaan. Ketika lahan tidak lagi mampu menopang kehidupan, masyarakat menjadi semakin rentan terhadap eksploitasi, baik oleh pengusaha perkebunan maupun oleh sistem kerja kolonial yang tidak berpihak pada kepentingan pribumi.

⁴⁴ Sri Edi Swasono dan Masri Singarimbun. *Transmigrasi Di...*(1986): 17.

⁴⁵ M. Amral Sjamsu. *Dari Kolonisasi Ke Transmigrasi 1905-1955* (Jakarta: Djambatan 1959): 5.

Situasi tersebut menjadi sinyal penting bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak cukup hanya dengan mempertahankan status quo atau menambah pengawasan atas distribusi tanah, tetapi diperlukan perubahan kebijakan menyeluruh yang mencakup perencanaan ruang, reformasi agraria, penyediaan akses pendidikan dan keterampilan di luar pertanian, serta pemerataan pembangunan antarpulau. Jika langkah-langkah tersebut tidak segera diambil, maka potensi ledakan sosial dan ekonomi yang lebih besar menjadi sangat mungkin terjadi.

Dalam konteks inilah, tekanan demografis yang dialami Hindia Belanda pada akhir tahun 1927 tidak hanya menjadi catatan statistik semata, melainkan juga menjadi refleksi atas sebuah sistem kolonial seringkali mengabaikan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan sumber daya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa permasalahan yang tampak teknis di permukaan—seperti kepadatan penduduk sesungguhnya berakar pada struktur sosial dan kebijakan yang timpang, serta kegagalan dalam melihat pembangunan secara adil dan berkelanjutan.⁴⁶

Pada awal abad ke-20, ketika mulai tersebar berbagai kabar yang cukup mengejutkan tentang kondisi kelebihan penduduk di Pulau Jawa yang saat itu mulai menimbulkan kekhawatiran serius mengenai ancaman kemiskinan dan kesulitan hidup yang bisa dihadapi masyarakat pemerintah Hindia Belanda pun akhirnya merasa perlu untuk mengambil langkah antisipatif. Maka pada bulan September tahun 1902, mereka mengeluarkan sebuah instruksi resmi kepada Asisten Residen Sukabumi yang bernama H.G. Heyting, tepatnya melalui surat keputusan tertanggal 30 September 1902 nomor 17. Dalam keputusan itu, Heyting diminta untuk benar-benar mendalami dan meneliti secara serius kemungkinan memindahkan

⁴⁶ Regerings Almanak 1938 Voor Nederlandsch Indie. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.

penduduk dari Pulau Jawa ke wilayah-wilayah lain di luar Jawa, yang pada masa itu dikenal sebagai daerah seberang, seperti pulau-pulau lain di Nusantara. Tujuannya tentu untuk mencari

solusi jangka
akibat
di Jawa tidak
kondisi sosial
masyarakat



panjang agar tekanan
padatnya penduduk
semakin
memperburuk
dan ekonomi
saat itu.⁴⁷

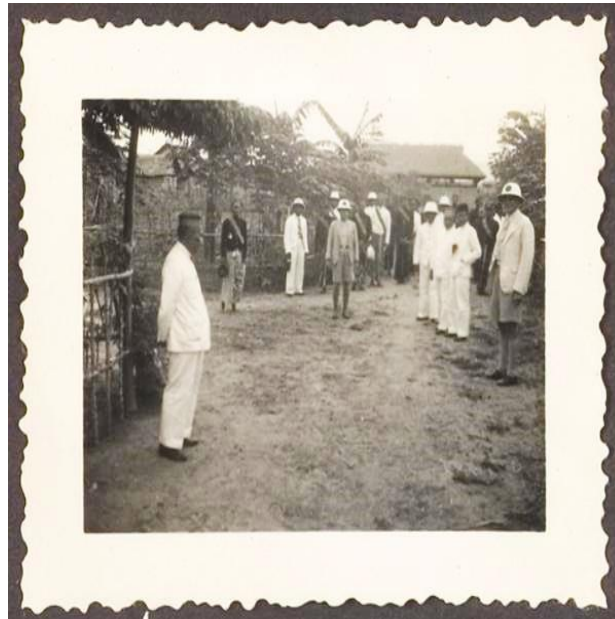
Foto 2: Kolonis-kolonis yang datang tahun 1938 sementara turun dari kapal di jembatan pelabuhan Polewali nantinya akan di antar dengan mobil ke distrik Mapilli (Sumber: Arsip Kantor Desa Bumi Ayu)

Istilah koloniasi memiliki penjelasan yang sama dengan transmigrasi, adalah suatu usaha untuk memindahkan penduduk secara besar-besaran dari suatu wilayah ke wilayah lainnya yang di kelola oleh pemerintah Hindia Belanda. Kolonisasi mengandung pengertian sebagai perpindahan penduduk ke daerah penempatan. Sedangkan transmigrasi yaitu perpindahan

⁴⁷ M. Amral Sjamsu. *Dari Kolonisasi Ke Transmigrasi 1905-1955*: 8.

penduduk dari suatu daerah atau pulau yang berpenduduk padat ke daerah atau pulau lain yang berpenduduk jarang.⁴⁸

Kalau kita menelusuri kembali jejak sejarah transmigrasi di Indonesia, khususnya yang terjadi pada masa kolonial Belanda, salah satu wilayah yang sangat penting untuk dibahas adalah Distrik Mapilli yang saat itu termasuk dalam Onderafdeeling Polewali, bagian dari Afdeeling Mandar. Kawasan ini nantinya akan dikenal luas sebagai salah satu pusat permukiman transmigran asal Jawa di Sulawesi, dan menjadi cikal bakal berdirinya Kecamatan Wonomulyo di



kemudian hari.

Foto 3: Sebuah Dokumentasi Penjemputan Kolonisasi di distrik Mapilli tahun 1940 (Sumber:https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/710773?solr_nav%5Bid%5D=7f69640f9b5f0b4b9118&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=6 diakses pada tanggal 10 Maret 2025)

Pada masa Hindia Belanda, daerah Mapilli awalnya belum terlalu ramai atau berkembang seperti sekarang. Wilayah ini masih berupa lahan yang luas, sebagian besar belum disentuh, dan dianggap memiliki potensi besar untuk pertanian. Letaknya yang strategis dan tanahnya yang subur membuat pemerintah kolonial melihatnya sebagai lokasi yang cocok untuk dijadikan daerah pemukiman baru dalam program pemindahan penduduk dari Pulau Jawa yang

⁴⁸ M. Amral Sjamsu. *Dari Kolonisasi Ke Transmigrasi 1905-1955*: 10.

saat itu sudah mulai menghadapi persoalan kelebihan penduduk dan kemiskinan yang cukup serius.⁴⁹

Pemerintah kolonial kemudian menetapkan Mapilli sebagai bagian dari distrik koloni di bawah administrasi Onderafdeeling Polewali. Dengan status tersebut, Mapilli dipersiapkan secara khusus untuk menerima gelombang-gelombang penduduk dari Jawa yang ingin membangun kehidupan baru di luar pulau. Para transmigran yang dikirim ke daerah ini mayoritas berasal dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan mereka dipilih melalui serangkaian proses yang cukup ketat.⁵⁰



Foto 4: Dokumentasi Anak-anak Transmigrasi Jawa yang di tampung di distrik Mapilli Tahun 1940

(Sumber: https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/700178?solr_nav%5Bid%5D=7f69640f9b5f0b4b9118&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=6 diakses pada tanggal 13 Maret 2025)

Sebelum para kolonis dikirim ke wilayah Mapilli, mereka biasanya terlebih dahulu dikumpulkan di rumah dinas Bupati atau Camat. Di sanalah mereka menunggu beberapa hari sebelum benar-benar berangkat meninggalkan kampung halaman mereka. Proses ini seperti masa persiapan terakhir, mereka harus menyesuaikan diri dengan keadaan dan bersiap meninggalkan tempat yang sudah mereka kenal seumur hidup. Ketika meninggalkan rumah,

⁴⁹ Adi Arwan Alimin. *Kampung Jawa di...*(2019): 41.

⁵⁰ Adi Arwan Alimin. *Kampung Jawa di...*(2019): 43.

para kolonis hanya membawa barang-barang penting yang dimiliki, seperti pakaian secukupnya dan, jika ada, peralatan pertanian pribadi. Namun bagi mereka yang tidak punya alat pertanian, tidak perlu khawatir. Setelah tiba di lokasi tujuan, alat-alat kerja seperti cangkul dan sabit akan dibagikan oleh pemerintah. Jadi, meskipun tidak semua orang berangkat dalam kondisi lengkap, pemerintah sudah menyiapkan fasilitas yang bisa digunakan bersama agar semua warga bisa segera bekerja dan membangun kehidupan di tempat baru.⁵¹

Selama menunggu keberangkatan, mereka biasanya tinggal selama kurang lebih tiga hari di rumah Bupati atau Camat. Di tempat ini, mereka mendapat pelayanan yang layak makanan tersedia, kesehatan mereka diperiksa, dan kebutuhan dasar lainnya dipenuhi. Pemerintah juga memberikan pengarahan agar para kolonis tetap menjaga kesehatan, karena perjalanan menuju lokasi tidak ringan dan hidup di tempat baru tentu membutuhkan tenaga yang cukup besar, terutama karena mereka akan langsung mulai bertani dan mengelola lahan.⁵²

Pengarahan ini bukan hanya soal fisik, tapi juga tentang kesiapan mental. Mereka diingatkan agar selalu menjaga semangat dan kerja sama, karena hidup di tempat baru berarti harus saling membantu satu sama lain, apalagi jika mereka berada jauh dari keluarga besar. Rasa kebersamaan sangat penting untuk membangun kehidupan baru. Keberangkatan dilakukan secara bertahap. Setiap kelompok atau gelombang biasanya berasal dari satu daerah yang sama. Hal ini sengaja dilakukan agar saat mereka sampai di lokasi tujuan, mereka bisa tinggal bersama di satu desa yang sama. Dengan begitu, rasa kebersamaan tetap terjaga, karena mereka hidup berdampingan dengan orang-orang yang sudah saling mengenal, memiliki bahasa dan kebiasaan yang serupa.⁵³

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sutiono. 64 tahun. 23 Oktober 2024.

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Sutiono. 64 tahun. 23 Oktober 2024.

⁵³ Memory Van Overgave Afdeling Mandar W. J. Leyds. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.



Foto 5: Dokumentasi Kapal (Koninklijke Paketvaart Maatschappij) dari Perusahaan Nederlandsche Handel-Maatschappij Yang Merupakan Angkutan bagi Para Transmigrasi di Wonomulyo

(Sumber: https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/767744?solr_nav%5Bid%5D=80ca113f10f6b5263624&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=6 diakses pada tanggal 23 Maret 2025)

Secara historis, proses pemberangkatan para kolonis ke wilayah Mapilli sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1937 dan berlangsung hingga sekitar tahun 1940. Dalam kurun waktu itu, proses pemindahan penduduk dilakukan secara bertahap, yaitu dalam enam gelombang. Setiap gelombang terdiri dari satu kelompok besar yang nantinya akan menetap di satu desa tertentu. Jadi, satu gelombang tidak menyebar ke berbagai tempat, melainkan ditempatkan secara utuh di satu desa agar mereka bisa membangun kehidupan baru bersama-sama dengan orang-orang yang berasal dari daerah yang sama. Hal ini tentu sangat membantu dalam proses adaptasi, karena mereka sudah saling mengenal dan memiliki kebiasaan serta bahasa yang sama.

Setelah menjalani masa penampungan di daerah asal yang biasanya dilakukan di rumah dinas bupati atau camat para kolonis diberangkatkan ke Surabaya dengan menggunakan kereta api. Dari situ perjalanan masih panjang. Begitu tiba di Surabaya, mereka langsung diarahkan ke pelabuhan, karena perjalanan selanjutnya harus dilanjutkan melalui laut. Tujuan akhir mereka adalah Mapilli, yang pada saat itu masuk dalam wilayah administratif distrik koloni, onderafdeeling Polewali, afdeling Mandar sebuah wilayah yang nantinya akan berkembang

menjadi Kecamatan Wonomulyo seperti yang kita kenal sekarang. Daerah itu memang sengaja dipilih sebagai kantong permukiman baru bagi para kolonis, karena dianggap memiliki potensi pertanian yang baik dan masih cukup luas untuk dihuni.⁵⁴

Perjalanan laut dari Surabaya ke wilayah tujuan memakan waktu sekitar tiga hari. Bayangkan saja, mereka harus bertahan selama itu di atas kapal, dengan segala keterbatasan fasilitas. Namun meski penuh tantangan, mereka tetap melanjutkan perjalanan dengan harapan bisa memulai kehidupan yang lebih baik. Setibanya di Pelabuhan Makassar, mereka tidak langsung menuju tempat tujuan akhir, karena masih ada proses administrasi yang harus diselesaikan. Di pelabuhan itu mereka transit sejenak untuk mengurus berbagai dokumen, pengecekan nama, serta kelengkapan data lainnya.⁵⁵

Setelah semua urusan administrasi selesai, mereka melanjutkan perjalanan ke dermaga Polewali. Dari titik inilah mereka kemudian diarahkan ke pemukiman baru yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Perjalanan panjang ini menunjukkan betapa besar usaha yang dilakukan pemerintah kolonial saat itu untuk memindahkan penduduk Jawa ke luar pulau, dan juga menunjukkan betapa besar harapan para kolonis untuk membangun hidup baru di tanah yang belum mereka kenal sebelumnya. Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, baik dari sisi perjalanan, kondisi alam, maupun penyesuaian hidup, semangat mereka untuk bertahan dan bekerja tetap kuat karena mereka percaya akan ada masa depan yang lebih baik di tempat tujuan.⁵⁶

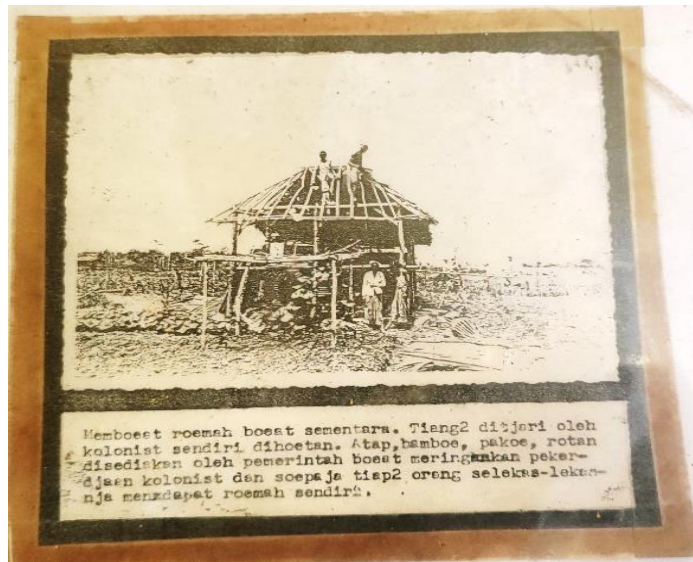
Awal kedatangan transmigran Jawa di Kecamatan Wonomulyo pada tahun 1937 gelombang pertama tidak terlalu banyak, berdasarkan informasi dari Bapak Sutrisno (50 tahun)

⁵⁴ Memory Van Overgave Afdeling Mandar W. J. Leyds. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.

⁵⁵ Andi Putra, Nur Alim. *Pemukiman Transmigran Jawa di Tanah Mandar 1937-1980*. Skripsi (Departemen Ilmu Sejarah: Unhas 2020): 57.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Rio Purwoko. 76 tahun. 23 Oktober 2024.

mengatakan bahwa hanya ada sekitar 600an orang yang terdiri dari pemimpin rombongan, tenaga ahli pertanian, tenaga kesehatan, guru, dan sebagainya.⁵⁷ Transmigran Jawa ke Sulawesi di angkut dengan menggunakan kapal laut. Setelah mereka berada di Kecamatan Wonomulyo transmigran tersebut berupaya membuka lahan yang nantinya akan menjadi lumbung pangan bagi pemerintah Belanda. Hanya saja luas pekarangan tanah yang di berikan kepada transmigran orang.



1/3 masing-masing

Foto 6: Base camp atau hunian sementara para kolonis tahun 1937 di hutan yang terbuat dari atap bambu, paku, rotan, disediakan oleh pemerintah Belanda demi meringankan pekerjaan kolonis agar setiap orang nantinya akan mendapat rumah sendiri (Sumber: Arsip Kantor Desa Bumi Ayu)

Sementara itu, menurut Subardi yang juga termasuk generasi ketiga dari transmigran Jawa (62 tahun) mengatakan orang-orang Jawa di sediakan base camp sebagai tempat hunian sementara bagi para petani di Wonomulyo. Setelah mereka mendapatkan hasil panen lebih akhirnya keluar dari base camp tersebut dan mencari lokasi untuk membangun rumah dengan

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno. 50 tahun. 22 Oktober 2024.

atap menggunakan alang-alang. Meskipun 1/3 luas tanah yang di berikan kepada transmigran mereka memanfaatkan pekarangan rumahnya sebagai lahan pertanian.⁵⁸

Kedatangan kolonis gelombang kedua pada tahun 1938 menjadi bagian penting dari kelanjutan proyek kolonisasi yang sudah dimulai tahun sebelumnya. Pada tahun itu, jumlah yang diberangkatkan jauh lebih besar dibandingkan gelombang pertama. Sekitar 710 keluarga dengan total lebih dari tiga ribu jiwa tiba dan mulai menetap di beberapa desa yang letaknya berdekatan, seperti Sumberjo, Campurejo, dan Sidorejo. Ketiga desa ini berada tidak jauh dari desa Sidodadi, tempat para kolonis gelombang pertama ditempatkan.⁵⁹

Menurut Suharjiman (71 tahun) kedatangan para transmigran di Kecamatan Wonomulyo pada gelombang selanjutnya rata-rata transmigran di Kecamatan Wonomulyo berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang kemudian disusul orang Jawa Barat tepatnya Kuningan yakni transmigrasi keluarga.⁶⁰ Meskipun demikian, keberadaan transmigrasi di Kecamatan Wonomulyo pertama sekali berada di Desa Bumi Ayu yang kemudian menyebar ke Desa-desa lainnya yang ada di Kecamatan Wonomulyo.

Namun, berbeda dengan kelompok awal yang memperoleh lahan garapan cukup luas, para kolonis di gelombang kedua dan seterusnya mulai merasakan perubahan. Mereka hanya mendapat jatah tanah pertanian yang lebih kecil, lebih sempit dibandingkan jatah sebelumnya yang mencapai setengah hektar. Ini menandakan bahwa semakin banyak jumlah kolonis yang datang, semakin terbatas pula sumber daya lahan yang tersedia untuk dibagikan secara merata.

Tahun berikutnya, tepatnya 1939, pemerintah kolonial kembali mengirimkan kelompok kolonis baru. Kali ini jumlahnya juga tidak sedikit terdiri dari 461 keluarga, dengan jumlah penduduk mencapai 1.862 jiwa. Mereka ditempatkan di wilayah yang kini kita kenal dengan nama Bumiayu, namun pada masa itu disebut sebagai Labuku. Di tempat inilah mereka mulai

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Subardi. 62 tahun. 23 Oktober 2024.

⁵⁹ Andi Putr Nur Alim. *Pemukiman Transmigran...*(2020): 62.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Suharjiman. 71 tahun. 22 Oktober 2024.

membangun kehidupan dan bertani, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada, terutama terkait luas lahan dan kondisi alam yang masih harus diolah dari awal.⁶¹



Foto 7: Kolonis tahun 1937 beserta istri dan anaknya di pekarangan yang sebagian ditanami tembakau, ubi kayu, dan pisang nampak di belakang. (Sumber: Arsip Kantor Desa Bumi Ayu)

Selanjutnya, pada tahun 1940, datang lagi kelompok kolonis yang merupakan gelombang keempat sekaligus menjadi kelompok terakhir yang ditempatkan di wilayah Wonomulyo. Jumlahnya memang lebih kecil dibandingkan gelombang-gelombang sebelumnya, yakni sekitar 183 keluarga dengan total penduduk sebanyak 913 jiwa. Setelah kedatangan gelombang terakhir ini, jumlah total seluruh kolonis yang telah ditempatkan di Wonomulyo hingga akhir tahun 1940 tercatat sebanyak 1.569 keluarga, dengan jumlah keseluruhan penduduk mencapai 5.470 jiwa.⁶²

Pada masa tiga bulan pertama setelah para transmigran menetap di wilayah Wonomulyo, kehidupan mereka perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda kemandirian, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan. Di pekarangan rumah masing-masing, mereka mulai memanen

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Trimo. 78 tahun. 25 Oktober 2024.

⁶² Andi Putra Nur Alim. *Pemukiman Transmigran...*(2020): 64.

hasil dari tanaman yang telah mereka tanam sejak awal kedatangan. Hasilnya mungkin belum melimpah, tapi setidaknya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari secara mandiri. Jenis tanaman yang ditanam kemungkinan besar merupakan tanaman-tanaman cepat panen yang memang ditujukan untuk kebutuhan konsumsi langsung, seperti sayuran dan umbi-umbian.⁶³

Sementara untuk kebutuhan pangan lainnya yang tidak bisa langsung mereka hasilkan sendiri, seperti kelapa misalnya, para transmigran mendapatkannya melalui interaksi dengan masyarakat lokal, khususnya penduduk asli Mandar yang bermukim di sekitar wilayah yang disebut sebagai distrik koloni. Di sinilah mulai terlihat adanya hubungan sosial dan ekonomi antara para pendatang dan penduduk lokal, yang tampaknya berlangsung secara alami karena adanya kebutuhan timbal balik.⁶⁴

Walaupun sudah mulai bisa memenuhi kebutuhan dasar, para transmigran tetap tidak meninggalkan pekerjaan utama mereka, yaitu menggarap sawah. Aktivitas pertanian ini terus dilakukan secara konsisten karena memang menjadi tumpuan utama untuk keberlangsungan hidup jangka panjang. Sawah-sawah yang mereka garap diharapkan dapat menjadi sumber pangan utama seperti beras, yang tentunya membutuhkan waktu lebih lama dibanding tanaman pekarangan.⁶⁵

Menariknya, bagi para transmigran yang datang lebih awal, tepatnya pada tahun 1937, hasil dari kerja keras mereka di lahan pertanian mulai bisa dinikmati satu tahun kemudian, yaitu pada 1938. Ini menunjukkan bahwa dalam waktu kurang dari dua tahun, mereka berhasil mengubah lahan yang sebelumnya belum tergarap menjadi lahan produktif. Namun, kondisi yang dihadapi oleh gelombang transmigran berikutnya, yang datang setelah tahun 1937,

⁶³ Memory Van Overgave Afdeling Mandar W. J. Leyds. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Subardi. 62 tahun. 22 Oktober 2024.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Subardi. 62 tahun. 22 Oktober 2024.

ternyata tidak seberat angkatan pertama. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka sudah bisa memperoleh bahan makanan dasar dari para kolonis yang datang lebih dulu. Artinya, tidak semua kesulitan awal harus mereka alami dari nol seperti para pendahulu mereka.



Foto 8: Kedatangan kolonis-kolonis baru di gudang-gudang yang terletak di tengah pekarangan baru (tahun tidak diketahui)(Sumber: Arsip Kantor Desa Bumi Ayu)

Kondisi ini menunjukkan bahwa telah terjalin solidaritas dan kerja sama yang cukup erat di antara para transmigran. Mereka saling membantu, terutama dalam hal berbagi hasil pertanian atau sumber pangan lain yang berhasil mereka kumpulkan lebih dulu. Pola hubungan seperti ini menggambarkan bahwa sejak awal kedatangan, para kolonis telah menjalin ikatan sosial yang cukup kuat, yang pada akhirnya turut membantu proses adaptasi dan keberhasilan program transmigrasi tersebut di daerah baru.

Kondisi awal di Mapilli tentu tidak mudah. Lahan-lahan yang luas itu masih harus dibuka, dijadikan sawah, kebun, dan tempat tinggal. Banyak transmigran yang awalnya mengalami kesulitan karena harus bekerja keras dari nol menebang hutan, membangun rumah, dan menanam tanaman pertama mereka. Namun, semangat mereka untuk membangun kehidupan

baru sangat besar. Mereka tidak hanya membawa barang, tapi juga membawa harapan, keterampilan, dan budaya kerja keras dari tanah Jawa.

Seiring berjalannya waktu, Mapilli dan wilayah sekitarnya mulai berkembang. Desa-desa hasil kolonisasi itu berubah menjadi komunitas yang hidup dan mandiri. Infrastruktur mulai dibangun, lahan pertanian semakin produktif, dan hubungan dengan masyarakat lokal pun perlahan terbentuk. Dari sinilah kemudian muncul wilayah yang dinamakan Wonomulyo, sebagai hasil dari perkembangan permukiman kolonisasi yang dimulai di Distrik Mapilli. Nama Wonomulyo sendiri menggambarkan harapan akan “hutan yang mulia,” sesuai dengan cita-cita para kolonis yang dulu membuka lahan dari awal.

Kalau kita melihat kembali sejarah awal transmigrasi ke wilayah Polewali, gelombang pertama yang datang pada tahun 1937 bisa dianggap sebagai langkah awal dari upaya pemindahan penduduk secara besar-besaran dari Pulau Jawa. Rombongan pertama ini terdiri dari masyarakat yang berasal dari berbagai daerah di Jawa. Mereka melakukan perjalanan laut yang cukup panjang menggunakan kapal milik perusahaan pelayaran Belanda, yaitu KPM (*Koninklijke Paketvaart Maatschappij*). Setelah melewati perjalanan laut yang melelahkan, akhirnya mereka tiba di dermaga Polewali pada tanggal 1 September 1937.⁶⁶

Jumlah orang yang ikut dalam gelombang ini tidak sedikit. Ada sekitar 115 kepala keluarga, dengan total hampir 400 jiwa. Setibanya di lokasi, mereka tidak langsung diberi lahan pertanian, melainkan terlebih dahulu menjalani proses pembagian tanah tempat tinggal. Proses ini dilakukan dengan sistem undian, jadi masing-masing keluarga mengambil nomor yang nantinya akan menentukan posisi rumah mereka. Artinya, siapa pun tidak bisa memilih seandainya di mana ia ingin tinggal semua harus menerima sesuai hasil undian. Meskipun

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sumpono. 85 tahun. 22 Oktober 2024.

terlihat sederhana, cara ini cukup efektif untuk menjaga keadilan dan menghindari keributan antar sesama kolonis.⁶⁷



Foto 9: Asisten Wedana Sidodadi Raden Soeparman berdiri di depan gudang-gudang yang berisi makanan, bibit, dan perkakas (tahun tidak diketahui)

(Sumber: Arsip Kantor Desa Bumi Ayu)

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Subardi. 62 tahun. 23 Oktober 2024.